



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Jendral Sudirman No. 157 Telp. (0511) 4799056 Marabahan 70511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor 188.4/ 008 /DPPKBP3A/2018**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPKBP3A yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala 2017-2022, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaga Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS DPPKBP3A KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang selanjutnya disebut Renstra DPPKBP3A merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KETIGA : Renstra DPPKBP3A Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Sistematisa Penulisan Renstra DPPKBP3A Tahun 2017-2022 meliputi :

pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, menjelaskan secara ringkas tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya DPPKBP3A dan Kinerja pelayanan DPPKBP3A

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DPPKBP3A

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKBP3A, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis yang merupakan salah satu bagian penting dalam dokumen Renstra DPPKBP3A dan menjadi dasar penentuan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menyajikan butir-butir penting dari permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat informasi yang menjelaskan mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKBP3A yang diselaraskan dengan RPJMD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan DPPKBP3A dari setiap strategi yang dipilih dalam lima tahun mendatang.

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Memuat tentang program DPPKBP3A yang merupakan program prioritas RPJMD dalam mencapai visi dan misi yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBP3A yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan

DPPKBP3A yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPPKBP3A dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

Memuat statement akhir yang berisikan harapan-harapan dari Pimpinan DPPKBP3A dalam melaksanakan dan memedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah menjadi dasar hukum kuat dan legal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara bidang urusan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 04 Juni 2018

Kepala,

Drs.H.Syarkawi HAM,MPd

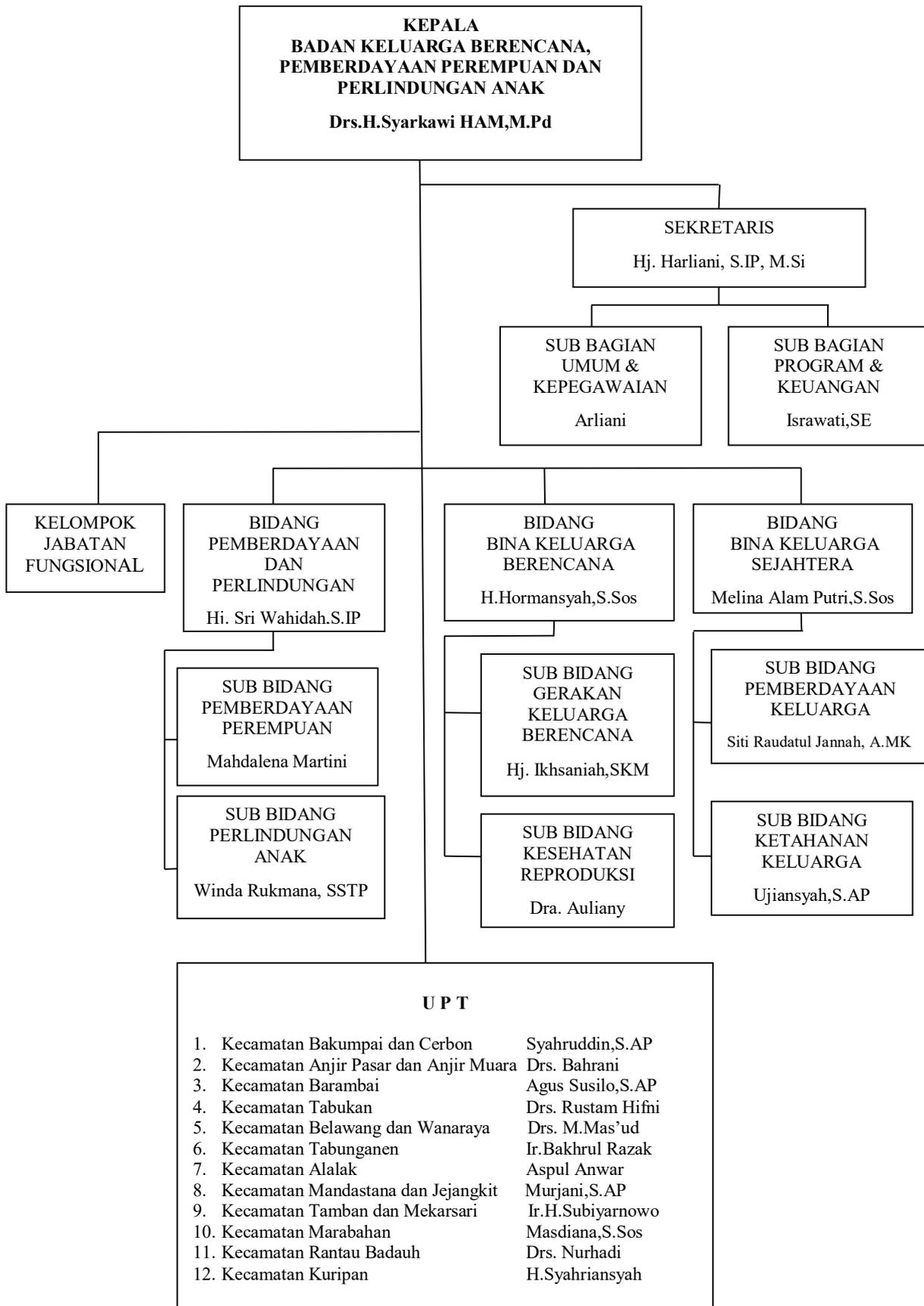
NIP : 19590812 197801 1 001

RENCANA STRATEGI

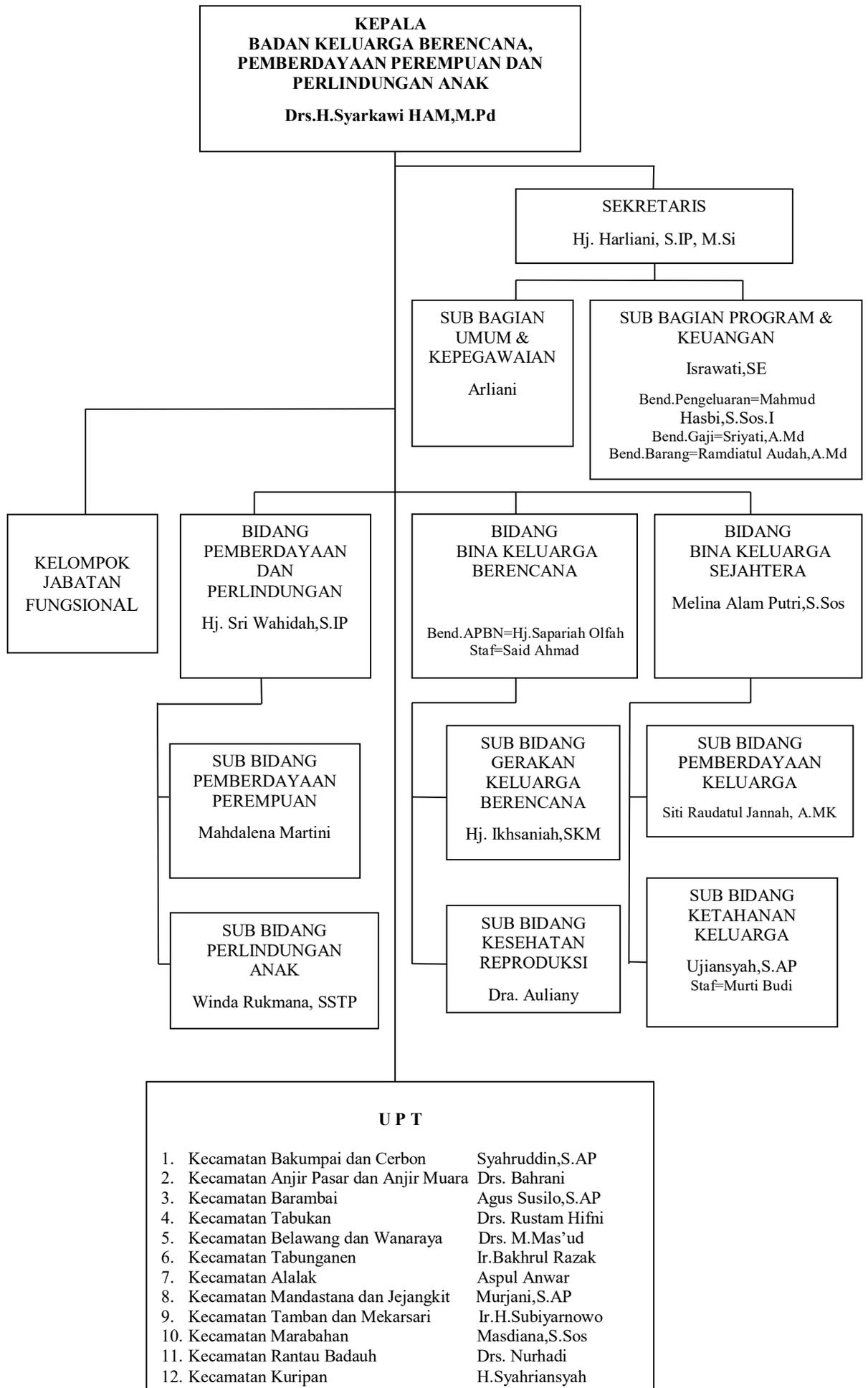
TAHUN 2017 – 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018**



- A. BAGAN TEMUAN JABATAN STRUKTURAL DAN STAF BADAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO KUALA
(Perda Nomor 17 Tahun 2010)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Nya, pada akhirnya selesai juga Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala sebagai tindak lanjut dari Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Akhirnya apabila dalam pembuatan Renstra ini terdapat kekurangan – kekurangan, mohon kiranya dapat dimaklumi, oleh karena mengingat keterbatasan kemampuan kami. Dan kami senantiasa menerima sumbangan saran yang bersifat konstruktif dan membangun sehingga dalam pembuatan laporan selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Marabahan, 30 Mei 2017
Kepala DPPKBP3A
Kabupaten Barito Kuala

Drs. H. Syarkawi. HAM, MPd
NIP. 19590812 197801 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan DPPKBP3A.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKBP3A	8
2.2 Sumber Daya DPPKBP3A.....	12
2.3 Kinerja Pelayanan DPPKBP3A	15
2.4 Dampak Program KB	32
2.5 Tantangan dan Peluang Pelayanan DPPKBP3A	36
BAB III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKBP3A	42
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta keterkaitannya dengan dppkbp3a	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	48

3.3.1. Telaahan Renstra K/L BKKBN Pusat.....	49
3.3.2. Telaahan Renstra BKKBN Provinsi Kal Sel.....	53
3.3.3. Telaahan Renstra K/L PPPA RI.....	56
3.3.4. Telaahan Renstra Dinas PPPA Provinsi Kal Sel	61
3.4. Telaahan RT/RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	65
3.5. Penentuan Isu Strategis.....	67
3.5.1. Isu Strategis K/L BKKBN Pusat	67
3.5.2 Isu Strategis BKKBN Provinsi Kal Sel.....	70
3.5.3. Isu Strategis DPPKBP3A	71
BAB IV Tujuan dan Sasaran.....	73
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah DPPKBP3A.....	73
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan DPPKBP3A	76
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan.....	78
BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan.....	89
BAB VIII Penutup.....	96

DAFTAR TABEL

BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPPKBP3A.....	8
	2.1. Tabel Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.....	12
	2.2. Tabel Jumlah pegawai yg mengikuti pelatihan penjeingan.....	12
	2.3. Tabel Jumlah pegawai berdasarkan golongan.....	12
	2.4. Tabel Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Staf.....	13
	2.5. Tabel Sarana dan Prasarana.....	14
	2.6. Tabel Contraceptive Prevalence Rate (CPR).....	16
	2.7. Tabel Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang.....	17
	2.8. Tabel Partisipasi Pria menjadi peserta KB Aktif.....	18
	2.9. Tabel Partisipasi Pria menjadi peserta KB Baru.....	19
	2.10. Tabel Peserta KB Baru secara Kumulatif.....	19
	2.11. Tabel Perkembangan Institusi Masyarakat Pedesaan	20
	2.12. Tabel Anggota Bina Keluarga Balita yang ber KB.....	21
	2.13. Tabel Cakupan Anggota BKR yang ber KB.....	22
	2.14. Tabel Cakupan Anggota BKL yang ber KB.....	23
	2.15. Tabel Cakupan Anggota UPPKS yang ber KB.....	24
	2.16. Tabel Capaian jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak.....	25
	2.17. Tabel Laporan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak yang ditangani pada P2TP2A.....	26
	2.18. Tabel Partisipasi SKPD yang melaksanakan PPRG.....	27
	2.19. Tabel (c.23) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan ..	29
	2.20. Tabel (c.24) Perkembangan jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	30
	2.21. Tabel Penduduk menurut Usia.....	32
	2.22. Tabel Penduduk Usia Balita.....	34
	2.23. Tabel Penduduk Usia Remaja.....	34
	2.24. Tabel Penduduk Usia Produktif.....	35
	2.25. Tabel Penduduk Lanjut Usia.....	35
	2.26. Tabel Tren Rasio Ketergantungan.....	36

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	42
	3.1. Tabel Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	43
	3.2. Tabel Arah Kebijakan dan strategi K/L BKKBN Pusat	49
	3.3. Tabel RKP, Program dan Kegiatan K/L BKKBN Pusat.....	52
	3.4. Tabel RKP, Program dan Kegiatan BKKBN Provinsi.....	54
	3.5. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran K/L Bidang PP.....	57
	3.6. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran K/L Bidang PA.....	57
	3.7. Tabel Kegiatan Prioritas dan Sasaran K/L PPPA.....	59
	3.8. Tabel Strategi dan Kebijakan DPPP A Provinsi.....	61
	3.9. Tabel Permasalahan dan Isu Strategis K/L BKKBN Pusat.....	67
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	63
	4.1. Tabel (c.25) Tujuan dan Sasaran	65
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
	5.1. Tabel (c.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPPKBP3A.....	76
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	78
	6.1. Tabel Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (Dalduk)..	79
	6.2. Tabel Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (KB).....	79
	6.3. Tabel Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (PPPA)....	80
	6.4. Tabel Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja (Sekretariat)	81
	6.5. Tabel (c.27) Rencana Progran Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif.....	84
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	89
	7.1. Tabel (c.28) Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon II.....	89
	7.2. Tabel Indikator Kinerja dan Terget Kinerja Eselon III (Dalduk	90
	7.3. Tabel Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon IV (Dalduk)	91
	7.4. Tabel Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon III (KB).....	91
	7.5. Tabel Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon IV (KB).....	92
	7.6. Tabel Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon III (PPPA)..	93
	7.7. Tabel Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon IV (PPPA)..	94

DAFTAR GAMBAR

BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPPKBP3A.....	8
	2.1. Gambar bagan SOTK DPPKBP3A.....	11

Tabel 6.4 Prg Prioritas Bdg Pengendalian Penduduk dan Kerangka Pendanaan

Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Out Come)	Kond Kinerj a Awal RPJM D	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
			Target/RP	Target/Rp	Target/Rp	Target/Rp	Target/Rp	
Pengendalian Penduduk	% Stake holder yg ter sos konsep PBK	0 %	11,90 % / 32210000	14,28 % / 50431000	15,48 % / 55474000	17,86 % / 61021000	20,24 % / 67123000	79,76 % / 266259000
Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK	% Data mikro kependuduk an di setiap desa yg tersedia (Prioritas)	100 %	100 % / 45201000	100 % / 64201000	100 % / 67201000	100 % / 62201000	100 % / 62201000	100 % / 301005000
Peningkatan Pengerakan dan pembinaan mitra kerja	% Mitra kerja yg mendptkan pemahaman ttg KKBPK melalui keg lomba	0%	0%	25 % / 80000000	25 % / 80000000	25 % / 80000000	25 % / 80000000	25 % / 320000000
Peningkatan dan Penguatan Lini Lapangan	% Kampung KB yang berhasil (Prioritas)	8,46 %	6,96 % / 167840995	6,96 % / 20000000 0	6,96 % / 20000000 0	6,96 % / 22500000 0	6,96 % / 230000000	43,28 % / 1022840995
Promosi dan KIE Program KKBPK	% Desa yang mendapatka n KIE Prg KKBPK	2,98 %	5,97 % / 38.387.650	5,97 % / 40.387.65 0	5,97 % / 42.387.65 0	5,97 % / 45.387.65 0	5,97 % / 48.387.650	29,85 % / 214.938.250

6.2.2. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja serta Kebutuhan Pendanaan Bidang Keluarga Berencana dapat disajikan

Keluarga Berencana	% KB Aktif (Prioritas)	77,92 %	78,87 % / 103.246.000	80,87 % / 118.732.900	82,87 % / 136.542.800	84,87 % / 157.024.500	86,87 % / 180.578.000	86,87 % / 896.124.200
Kesehatan Reproduksi Remaja	% Kelompok Ketahanan Keluarga yg dibina (BKR) (Prioritas)	7,89 %	9,21 % / 24.036.500	11,84 % / 27.641.900	13,16 % / 31.788.000	13,16 % / 36.556.200	13,16 % / 42.039.600	60,53 % / 162.062.200
Pelayanan Kontrasepsi	% Peserta KB MKJP	12,56 %	13,47 % / 65.805.000	14,47 % / 75.675.700	15,47 % / 87.027.000	16,47 % / 100.081.000	17,47 % / 115.093.000	17,47 % / 443.681.700
Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg mandiri	% Kelompok Ketahanan Keluarga (UPPKS) yang dibina (Prioritas)	5,77 %	12,28 % / 78.429.000	14,03 % / 86.271.900	15,79 % / 94.899.000	17,54 % / 104.388.900	17,54 % / 114.827.800	77,19 % / 478.816.600
Pengembangan bahan informasi ttg pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak	% Kelompok Ketahanan Keluarga (BKB) yang dibina (Prioritas)	3,66 %	4,19 % / 40.390.000	5,23 % / 46.448.500	5,23 % / 53.415.500	5,23 % / 61.427.800	5,23 % / 70.641.800	25,13 % / 272.323.600
Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	% Jumlah tenaga pendamping BKB yang sdh dilatih	0 %	0 %	8,9 % / 24.000.000	8,9 % / 26.400.000	8,9 % / 29.040.000	8,9 % / 31.944.000	35,60 % / 111.384.000

6.2.3. Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja serta Kebutuhan Pendanaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Layak Anak (Prioritas)			40.000.00 0	45.000.00 0	50.000.00 0	55.000.000	190.000.000
	% kelompok masyarakat/ Parpol yg mendptkan sos ttg KKG	15%	15% / 15.000.000	30% / 16.500.00 0	30% / 18.000.00 0	30% / 20.000.00 0	30% / 22.000.000	30% / 91.500.000
Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	% Forum Anak Daerah yang dibina (Prioritas)	70 %	80 % / 175.801.000	80 % / 192.500.0 00	80 % / 225.000.0 00	80 % / 290.000.0 00	80 % / 325.000.000	80 % / 1.208.301.0 00
	% SKPD yang melaksanakan PPRG (Prioritas)	33,33 %	33,33 % / 10.500.000	33,33 % / 15.000.00 0	0 %	0 %	0 %	100 % / 25.500.000
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	% Peningkatan Jml Klpk Pencegahan KDRT	0 %	20 % / 270.100.000	20 % / 290.000.0 00	20 % / 310.000.0 00	20 % / 340.000.0 00	20 % / 370.000.000	100 % / 1.580.100.0 00
	% Desa dengan Gerakan Sayang Ibu (Prioritas)	100 %	100 % / 130.000.000	100 % / 145.000.0 00	100% / 160.000.0 00	100 % / 175.000.0 00	100 % / 190.000.000	100 % / 800.000.000
Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	% Organisasi perempuan yg terlibat dalam pembangunan	0 %	17,39 % / 115.000.000	17,39 % / 150.000.0 00	17,39 % / 170.000.0 00	21,73 % / 185.000.0 00	26,08 % / 200.000.000	100 % / 820.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada DPPKBP3A bertujuan untuk

Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih periode 2017-2022.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

7.1. Indikator Kinerja Kepala DPPKBP3A (IKU Eselon II)

Tabel 7.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kepala SKPD (Eselon II) yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				
	Indikator Kinerja (Out come)	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Angka Laju Pertumbuhan penduduk	1,42	1,37	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37
2	Unmeet Need	13,91	9,66	13,06	12,21	11,36	10,51	9,66
3	Score Capaian KLA	100	550	300	350	400	500	550
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,11	91,61	89,61	90,11	90,61	91,11	91,61
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,40	68,40	67,60	67,80	68,00	68,20	68,40

7.2. Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk (IK Eselon III)

Indikator Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk beserta Target Kinerja selama

	Indikator Kinerja (Out come)	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	56,98	51,98	55,98	54,98	53,96	52,98	51,98
2.	Persentase masyarakat yg mengetahui ttg isu-isu kependudukan	40	65	45	50	55	60	65
3.	Persentase desa yang melaksanakan KIE secara efektif	13,93	10,20	9,95	10	10,05	10,15	10,20
4.	Persentase desa yg berhasil dalam pembuatan data dan informasi KKBPK	50	80	60	65	70	75	80

7.2.1. Indikator Kinerja Seksi Pengendalian Penduduk (IK Eselon IV)

Indikator Kinerja Seksi Pengendalian Penduduk beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.3. IK dan Target Kinerja Seksi Pengendalian Penduduk (Es IV)

yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Stake Holder dan Mitra Kerja yg terpapar konsep pembangunan berwawasan kependudukan	0	67	10	12	13	15	17
2	Jumlah mitra kerja yg memanfaatkan data kependudukan	0	10	10	10	10	10	10
3	Jumlah Desa dg data mikro kependudukan yg tersedia	0	73	17	14	14	14	14
4.	Jumlah KK yang data kependudukannya ter update	3431	9053	4115	4115	5761	7407	9053

7.2.2. Indikator Kinerja Seksi Penyuluhan dan Penggerakan (Eselon IV)

Indikator Kinerja Seksi Penyuluhan dan Penggerakan beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.4. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Seksi Penyuluhan dan Penggerakan (Es IV) yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				
	Indikator Kinerja (Out Put)	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4.	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	0	402	402	402	402	402	402
5	Jumlah Desa yang mendapatkan KIE KKBPk	6	60	12	12	12	12	12

7.3. Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana (IK Eselon III)

Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.5. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Bidang Keluarga Berencana (IK Eselon III) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				
	Indikator Kinerja (Out come)	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	% KB Aktif (Prioritas)	77,92 %	86,87 %	78,87%	80,87%	82,87%	84,87%	86,87%
2.	% Kelompok Ketahanan Keluarga yg dibina (BKR) (Prioritas)	7,89 %	60,53 %	9,21 %	11,84%	13,16%	13,16%	13,16%
3.	% Peserta KB MKJP	12,56 %	17,47 %	13,47%	14,47%	15,47%	16,47%	17,47%
4.	% Kelompok Ketahanan Keluarga (UPPKS) yang dibina (Prioritas)	8,77 %	77,19 %	12,28%	14,03%	15,79%	17,54%	17,54%
5.	% Kelompok Ketahanan							

7.3.1. Indikator Kinerja Seksi Penjaminan ber KB (Eselon IV)

Indikator Kinerja Seksi Penjaminan ber KB beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.6. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Seksi Penjaminan ber KB (Eselon IV) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				
	Indikator Kinerja (Out Put)	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Peserta KB Aktif (Prioritas)	45.034	47.934	45.614	46.194	46.774	47.354	47.934
2.	Jumlah Pelayanan KB Baru IUD dan Implant	708	2.000	0	500	500	500	500
3.	Jumlah Peserta KB Pria	885	1029	949	969	989	1009	1029
4.	Jumlah Akseptor yang menggunakan MKJP	5.655	7.655	6.055	6.455	6.855	7.255	7.655
5	Jumlah akseptor MOP dan MOW	44	290	42	50	58	66	74

7.3.2. Indikator Kinerja Seksi Pembangunan Keluarga (Eselon IV)

Indikator Kinerja Seksi Pembangunan Keluarga beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.7. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Seksi Pembangunan Keluarga (Eselon IV) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	Indikator RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
--	-----------------	-----------------------------	--	--	--	--

	keluarga							
2.	Jumlah Kelompok BKR yg dibina (Prioritas)	7	46	7	9	10	10	10
3.	Jumlah Kelompok PIK Remaja yg dibina	0	20	0	5	5	5	5
4.	Jml Kelompok UPPKS yang dibina (Prioritas)	7	44	7	8	9	10	10
5.	Jumlah Prt Pembinaan kepada PKB dan mitra kerja	4	20	4	4	4	4	4
6.	Jumlah kelompok BKB yg dibina (Prioritas)	8	48	8	10	10	10	10
7.	Jumlah tenaga pendamping BKB yang dilatih	0	204	0	51	51	51	51

7.4. Indikator Kinerja Bidang Perlindungan Perempuan & Anak (IK Eselon III)

Indikator Kinerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.8. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Bidang PPA (Eselon III) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				
	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	% Institusi Layak Anak	0.5 %	4.8 %	0 %	1.08 %	1.08 %	1.08 %	1.08 %

	melaksanakan PPRG (Prioritas)							
5.	% Jumlah Kelompok Pencegahan KDRT	0 %	100 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
6.	% Desa dengan Gerakan Sayang Ibu (Prioritas)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	% Organisasi Perempuan yg terlibat dalam pembangunan	0 %	100 %	17,39%	17,39%	17,39%	21,73%	26,08%

7.4.1. Indikator Kinerja Seksi Perlindungan Anak (Eselon IV)

Indikator Kinerja Seksi Perlindungan Anak beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.9. Indikator Kinerja dan Target Kinerja Seksi Perlindungan Anak (Es IV) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				
	Indikator Kinerja (Out Put)	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Institusi yg mendapat predikat Layak Anak	0	16	0	4	4	4	4
2.	Jumlah FAD yg dibina	7	40	8	8	8	8	8
3.	Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yg dilatih tentang KHA	0	150	0	0	50	50	50
4.	Jumlah buku / profil data							

7.	Jumlah Kelompok Pencegahan KDRT (PIK Keluarga) yg dibentuk di 17 Kecamatan	50	85	7	7	7	7	7
----	--	----	----	---	---	---	---	---

7.4.2. Indikator Kinerja Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan (Eselon IV)

Indikator Kinerja Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.10 Indikator Kinerja dan Target Kinerja Seksi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan (Eselon IV) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja (Out Put)	Indikator RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				
		Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Akhir RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jl masy/kdr/parpol/ormas yang memahami tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	0	250	50	50	50	50	50
2.	Jml pst sos pemberdy perempuan dibidg politik	0	160	0	40	40	40	40
3.	Jumlah SKPD yg melaksanakan PPRG (Prioritas)	14	44	6	6	6	6	6
4.	Jumlah Desa yg dibina Gerakan Sayang Ibu (Prioritas)	17	17	17	17	17	17	17

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan pengembangan dari program-program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, terutama terkait dengan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) periode Tahun 2017-2022 ini disusun sebagai bahan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta bahan rujukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra-Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 ini kami harapkan dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala dibuat dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan strategis merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu alat untuk mencapai tujuan pelayanan public agar demokratis, transparan , akuntabel dan terukur.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Maka perlu adanya penvelarasan terhadap

hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategi apa yang perlu dilakukan oleh DPPKBP3A agar tujuan tercapai. Rencana Strategi juga berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas DPPKBP3A serta tolok ukur pencapaiannya.

Dengan demikian Rencana strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif di DPPKBP3A yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, dan membantu DPPKBP3A untuk menemukan dan mendefinisikan kembali masalah utama (isu kritis) yang dihadapi DPPKBP3A. Oleh karena itu rencana strategis DPPKBP3A menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat, baik formula maupun proses penyusunan Renstra SKPD benar-benar mampu mendukung visi, misi dan program Bupati dan RPJMD dengan memperhatikan agenda nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 memperhatikan arah dan garis kebijakan terbaik yang telah dirumuskan antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan selatan Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang

21. Keputusan Bupati Barito Kuala No: 188.45/240/KUM/2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RENSTRA akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama di level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2017-2022 dan di dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Tujuan dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk :

1. Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Barito Kuala kedalam bentuk strategi,

3. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbarui.
4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Melakukan analisis kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut diatas.
6. Membagi pencapaian sasaran setiap bidang urusan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Menjelaskan tentang:

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKBP3A

2.2 Sumber Daya DPPKBP3A

2.3 Kinerja Pelayanan DPPKBP3A

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKBP3A

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DPPKBP3A,

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKBP3A

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga Dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKBP3A

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Dalam bagian ini menjelaskan tentang rumusan Strategi yang dipilih

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dan penanggung jawab berdasarkan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Pada Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Utama berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis 2017-2022 dan Penetapan Indikator Kinerja DPPKBP3A terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja tersebut akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBP3A yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPPKBP3A dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP.

Memuat Statemen akhir yang berisikan harapan-harapan dari Pimpinan Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan dan memedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah menjadi dasar hukum kuat dan legal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara bidang urusan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKBP3A

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah membentuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 pasal 2 (d) Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang urusan DPPKBP3A yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok.

Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2017 pasal 3 ayat 1 adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan struktur organisasi Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2017 pasal 2 terdiri atas

1. **Unsur Pimpinan** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. **Unsur Pembantu Pimpinan** : Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris Dinas

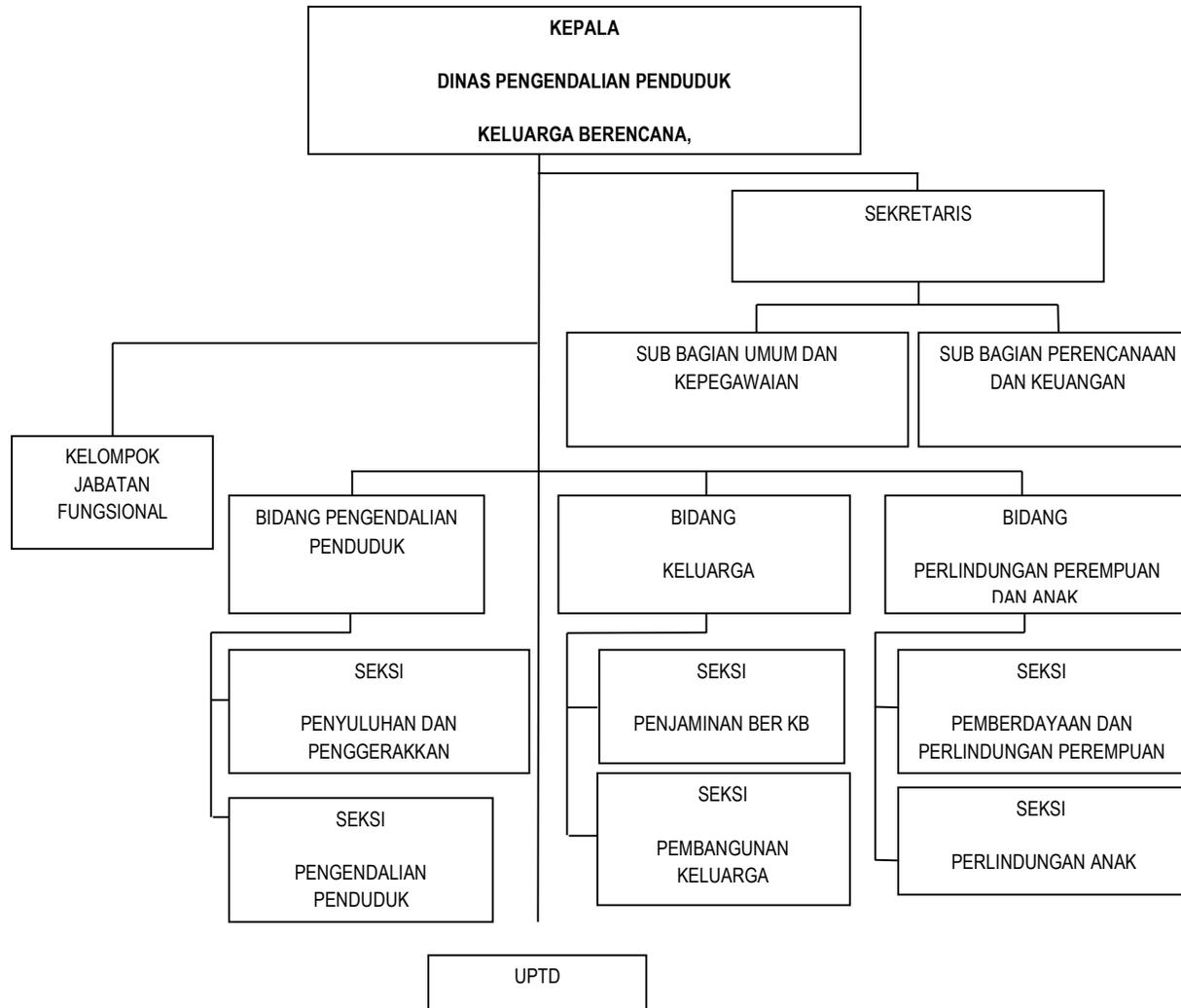
- a. Bidang Pengendalian Penduduk yang terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu oleh Seksi Penyuluhan dan Penggerakkan dan Seksi Pengendalian Penduduk
- b. Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh Seksi Penjaminan Ber-KB dan Seksi Pembangunan Keluarga.
- c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdiri dari Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Seksi Perlindungan Anak

4. Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari para Petugas Lapangan KB, yang sejak bulan Januari 2018 status kepegaweannya menjadi pegawai Pusat. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya bersifat pembinaan dan pemberdayaannya dalam penguatan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Gambar 2.1.

Bagan SOTK DPPKB3A Kabupaten Barito Kuala



2.2 Sumber Daya DPPKBP3A

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah personil Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala sebanyak 25 Orang yang terdiri dari 11 orang Pria dan 14 orang wanita, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 20 orang dan pegawai honorer sebanyak 5 orang.

Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Wanita	Persentase	
				LAKI-LAKI	Wanita
1	S2	1	0	4	0
2.	S1	7	7	28	28
3.	D3	0	3	0	12
4.	D1	-	-	-	-
5.	SLTA	3	4	12	16
6.	SLTP	-	-	-	-
Jumlah		11	14	44	56

2.2.2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjejaran

Kesiapan pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjejaran sebagaimana pada table berikut ini :

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjejaran

2.	Diklat Pim III	0	2	0	10
3.	Diklat Pim IV	6	6	30	30
Jumlah		7	8	35	40

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala adalah golongan III (tiga) berjumlah 12 orang (60 %), dan yang paling sedikit adalah golongan II (dua) berjumlah 2 orang (10 %), secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV/c	1	-	1
2.	IV/b	-	-	-
3.	IV/a	1	4	5
4.	III/d	5	4	9
5.	III/c	1	1	2
6.	III/b	-	-	-
7.	III/a	-	1	1
8.	II/d	1	1	2
9.	Tenaga Kontrak	2	3	5
Jumlah		11	14	25

Tabel 2.4. Jumlah pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	-	3	3
3.	Eselon IV	0	5	5
4.	Es IV (Ka.UPT)	6	1	7
4.	Penyuluh KB	13	22	35
5.	Pelaksana	2	2	4
6.	Tenaga Kontrak	2	3	5
Jumlah		24	36	60

Untuk tenaga Penyuluh KB, status kepegawaiannya telah menjadi pegawai pusat sejak tanggal 1 Januari 2018 namun secara pembinaannya masih menjadi tanggung jawab DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala.

2.2.5. Sarana Prasarana atau Aset Yang Dikelola

Adapun sarana dan prasarana pendukung kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana DPPKBP3A

No	Jenis Aset	Jumlah
1.	Kendaraan Dinas Roda 4	3

5.	Lemari Kayu	7
6.	Kursi Tamu	1
7.	Kursi Biasa	1
9.	Kursi Tangan	3
10.	Sofa	1
11.	AC Sentral	2
12.	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
13.	Meja Kerja	21
14.	Kursi Kerja	8
15.	AC Unit	2
16.	Kipas Angin	10
17.	Alat Pendingin	2
18.	Alat Dapur lainnya	4
19.	Proyektor & Attachment	1
20.	Public Address	12
21.	Printer	7
22.	Notebook	6
23.	Laptop	13
24.	PC Unit	13

2.3 Kinerja Pelayanan DPPKBP3A

Selama 4 (empat) tahun terakhir Pelayanan SKPD yang telah diberikan kepada

2.3.1 Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif

a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) / Peserta KB Aktif

Penurunan fertilitas merupakan indikator keberhasilan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan parameter pemakaian alat kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi untuk wanita kawin di Kabupaten Barito Kuala periode 2014 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan dari 77,58 % di tahun 2014 naik menjadi 77,92 % di tahun 2017. (Ada kenaikan sebesar 0,34 %) selama kurun waktu 4 tahun. Namun kalau dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra DPPKBP3A sebesar 87 %, maka capaian kinerjanya sebagai berikut : Capaian Peserta KB Aktif thn 2017 sebesar 77,92 % dibagi target sebesar 87 % = 89,56 %.

Untuk lebih jelasnya pencapaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Contraceptive Prevalence Rate (CPR) / Pst KB Aktif

Tahun	Jumlah PUS	IUD	MOP	MOW	IMP	Suntik	Pil	Kdm	Jml	%
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
2014	62.630	852	212	671	6.062	18.756	20.989	1.049	48.591	77,58
		1,75	0,44	1,38	12,47	38,60	43,20	2,16	100,00	
2015	63.392	842	234	661	6.241	19.497	20.835	1.002	49.312	77,79
		1,71	0,47	1,34	12,66	39,54	42,25	2,03	100,00	
2016	60.010	847	252	609	5.527	20.039	19.580	791	47.645	79,39
		1,78	0,53	1,28	11,60	42,06	41,09	1,66	100,00	
2017	57.794	767	276	419	4.193	20.341	18.429	609	45.034	77,92

hal tersebut dipengaruhi oleh turun naiknya jumlah PUS setiap tahunnya disebabkan ada penambahan PUS baru karena perkawinan dan juga penurunan karena adanya perceraian dan bebas PUS bagi wanita kawin yang usianya sudah memasuki 50 tahun. Hal ini perlu dijadikan skala prioritas untuk sosialisasi Alat kontrasepsi seluruh metode agar pencapaian peserta KB di Kabupaten Barito Kuala dapat ditingkatkan lagi secara optimal.

b. Peserta KB Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pemakaian kontrasepsi MKJP dari tahun ke tahun mengalami penurunan, ada kenaikan hanya pada tahun 2015 sebesar 0,13 % bila dibanding tahun 2014. Penambahan KB baru MKJP ternyata tidak menambah KB Aktif MKJP hal tersebut disebabkan karena ada peserta KB MKJP yang lama berhenti menggunakan MKJP dikarenakan ingin menambah anak lagi atau sudah memasuki monopause sehingga alkon MKJP yang dipakainya harus dicabut. Untuk pemakaian kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ini dapat disampaikan padal table berikut :

Tabel 2.7. Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

No	Tahun	Peserta Aktif	Peserta KB Aktif MKJP				Jml	%
			IUD	OW	OP	IMP		
1	2014	48591	852	671	212	6062	7797	16,05
2	2015	49312	842	661	234	6241	7978	16,18
3	2016	47645	847	609	252	5527	7235	15,18
4	2017	45034	767	419	276	4193	5655	12,56

Dari table diatas dapat diketahui bahwa pemakaian kontrasepsi MKJP di Kabupaten

c. Partisipasi Pria mejadi Peserta KB Aktif.

Secarakumulatif perkembangan jumlah peserta KB aktif pria di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 1.261 akseptor (2,59 %) pada tahun 2014 menjadi 885 akseptor (1,96 %) dari total peserta KB aktif yang ada pada tahun 2017, jadi ada penurunan sebesar 0,63 % selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Oleh Karena itu kegiatan penyuluhan KB Pria harus tetap menjadi skala prioritas rencana strategis 5 tahun mendatang.

Untuk lebih jelasnya dapat dicermati tabel berikut :

Tabel 2.8. Partisipasi Pria menjadi Peserta KB Aktif

No	Tahun	Jml PA	MOP	Kondom	Jumlah	%
1	2014	48.591	212	1.049	1.261	2,59
2	2015	49.312	234	1.002	1.236	2,51
3	2016	47.645	252	791	1.043	2,19
4	2017	45.034	276	609	885	1,96

2.3.2. Hasil Pembinaan Peserta KB Baru.

a. Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Baru.

Secarakumulatif perkembangan jumlah peserta KB Baru Pria di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 594 akseptor (5,75 %) pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebesar 108 akseptor (1,93 %) dari total peserta KB Baru maka ada penurunan sebesar 3,82 %, dan partisipasi pria dalam ber KB ini masih sangat rendah sekali dibanding total peserta

Tabel 2.9. Partisipasi Pria Menjadi Peserta KB Baru

No	Tahun	Jumlah P Baru	MOP	Kondom	Jumlah	%
1	2014	10.323	32	562	594	5,75
2	2015	7.408	37	336	373	5,03
3	2016	5.841	42	145	187	3,20
4	2017	5.580	46	62	108	1,93

b. Peserta KB Baru Kumulatif.

Perkembangan hasil pencapaian peserta KB Baru (kumulatif) di Kabupaten Barito Kuala menurun 21,57 % dari total 10.323 (91,56%) pada tahun 2014 menjadi 5.580 (69,99 %) pada tahun 2017 dari target KB Baru tahun 2017, Hasil pelayanan KB Baru pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Peserta KB Baru Kumulatif Tahun 2014 - 2017

Tahun	KKP	IUD	MOP	MOW	IMP	Suntik	Pil	Kdm	Jml	%
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
2014	11.274	120	32	25	1.241	4.587	3.756	562	10.323	91,56
		1,75	0,44	1,38	12,47	38,60	43,20	2,16	100,00	
2015	12.875	108	37	45	1.109	3.181	2.592	336	7.408	57,54
		1,71	0,47	1,34	12,66	39,54	42,25	2,03	100,00	
		120	42	36	694	3.358	1.446	145	5.841	53,10

2.3.3. Hasil Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Ada 2 (dua) indikator utama yang dapat disampaikan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pembinaan terhadap Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), yaitu PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan para institusi ini terhadap keberhasilan program KB cukup besar, para institusi merupakan “**UJUNG TOMBAK**” bagi pelaksanaan program KB di lini lapangan Perkembangan keberadaan institusi tersebut dapat disampaikan sbb :

Tabel 2.11. Perkembangan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

KLASIFIKASI	PPKBD		SUB PPKBD	
	Absolut	%	Absolut	%
Dasar	104	51.74	204	54.25
Berkembang	66	32.83	123	32.71
Mandiri	31	15.42	49	13.03
Total	201	100	376	100

Dari tabel diatas dapat diketahui perkembangan IMP di Kabupaten Barito Kuala sudah cukup baik. Secara kualitas masih pada klasifikasi “Dasar”.

2.3.4. Hasil Pembinaan Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

a. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB

Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui pembinaan kelompok BKB ini dilaksanakan dengan cara peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan

Kegiatan pembinaan anggota kelompok BKB ini ditargetkan untuk anggota kelompok BKB yang ber KB pada tahun 2014 sebesar 89,67 % dan tercapai sebanyak 89,96 % atau 100,32 % dari target, jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017, yang mana telah ditargetkan sebesar 92,54 % dan tercapai sebanyak 86,18 % atau 93,13 % dari target, maka terjadi penurunan sebesar 7,19 % selama kurun waktu 4 tahun terakhir.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.12. Anggota Bina Keluarga Balita yang ber KB

No	Tahun	Target	Terealisasi	Prosentase
1	2014	89,67 %	89,96 %	100,32 %
2	2015	90,00 %	89,68 %	99,64 %
3	2016	90,33 %	92,02 %	101,87 %
4	2017	92,54 %	86,18 %	93.13 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan Anggota BKB yang ber KB di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014-2017 mengalami turun naik namun masih dalam posisi yang sangat bagus dikarenakan pencapaiannya sudah diatas 80 % untuk selanjutnya akan dipertahankan atau ditingkatkan kualitas metode kontrasespinya menuju Kontrasepsi Jangka Panjang.

b. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber KB

Bimbingan, Ketahanan Keluarga melalui pembinaan kelompok BKB ini

Kegiatan pembinaan anggota kelompok BKR ini ditargetkan untuk anggota kelompok BKR yang ber KB pada tahun 2014 sebesar 92,53 % dan tercapai sebanyak 92,34 % atau 99,79 % dari target, jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017, yang mana telah ditargetkan sebesar 93,47 % dan tercapai sebanyak 88,02 % atau 94,17 % dari target, maka terjadi penurunan sebesar 5,62 % selama kurun waktu 4 tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13. Cakupan Anggota BKR yang ber KB

No	Tahun	Target	Tercapai	Prosentase
1	2014	92,53 %	92,34 %	99,79 %
2	2015	92,64 %	92,64 %	100,00 %
3	2016	92,64 %	92,64 %	100,00 %
4	2017	93,47 %	88,02 %	94,17 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan anggota BKR yang ber KB di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014-2017 mengalami naik turun, namun secara keseluruhan pencapaiannya sudah sangat bagus dikarenakan pencapaiannya sudah diatas 80 % untuk selanjutnya akan dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pemakaian kontrasepsinya ke arah MKJP untuk mengurangi D.O.

c. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber KB

Kegiatan pembinaan anggota kelompok BKL ini ditargetkan untuk anggota Kelompok BKL yang ber KB pada tahun 2014 sebesar 87,61 % dan tercapai sebanyak 89,25 % atau 101,87 % dari target. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017, yang mana telah ditargetkan sebesar 91,34 % dan tercapai sebanyak 83,56 % atau 91,48 % dari target. maka terjadi penurunan sebesar 10,39 % selama kurun waktu 4 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14. Cakupan Anggota BKL yang ber KB

No	Tahun	Target	Tercapai	Rasio
1	2014	87,61 %	89,25 %	101,87 %
2	2015	87,66 %	87,33%	99,62 %
3	2016	89,40 %	87,73 %	98,13 %
4	2017	91,34 %	83,56 %	91,48 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan anggota BKL yang ber KB di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014-2017 mengalami penurunan, namun secara keseluruhan pencapaiannya sudah sangat bagus dikarenakan pencapaiannya sudah diatas 80 % untuk selanjutnya akan dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pemakaian kontrasepsinya.

d. Cakupan Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB.

Bimbingan Berhardayan Keluarga ini dilaksanakan dengan cara Berhardayan

Kegiatan pembinaan kelompok UPPKS ini ditargetkan untuk anggota kelompok UPPKS yang ber KB pada tahun 2014 sebesar 85,45 % dan tercapai sebanyak 85,70 % atau 100,29 % dari target. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2017, yang mana telah ditargetkan sebesar 87,77 % dan tercapai sebanyak 86,30 % atau 98,32 % dari target, maka terjadi penurunan sebesar 1,97 % dalam kurun waktu selama 4 tahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.15. Cakupan Anggota UPPKS yang ber KB.

No	Tahun	Target	Tercapai	Rasio
1	2014	85,45 %	85,70 %	100,29 %
2	2015	86,16 %	69,68 %	80,87 %
3	2016	87,63 %	86,87 %	99,13 %
4	2017	87,77 %	86,30 %	98,32 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan anggota UPPKS yang ber KB di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014-2017 mengalami naik turun, namun secara keseluruhan pencapaiannya sudah sangat bagus dikarenakan pencapaiannya sudah diatas 80 % untuk selanjutnya akan dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pemakaian kontrasepsi dan diarahkan ke pemakaian kontrasepsi MKJP agar lestari.

2.3.5. Hasil Pembinaan Kabupaten Layak Anak

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan Kabupaten berbasis

Sebagai dampak dari arus informasi yang sangat cepat dan cenderung kurang terkendali, menurunnya norma-norma agama di masyarakat serta kesibukan para orangtua, membuat anak-anak semakin kurang terkontrol, ikut-ikutan gaya hidup orang luar serta pergaulan bebas semakin dianggap biasa bahkan mungkin tidak tabu lagi.

Pernikahan diusia anak tidak lagi hanya karena keinginan orangtua, tetapi karena kondisi anak yang sudah hamil sudah marak terjadi, meningkatnya jumlah perceraian karena kedua pasangan yang belum siap menghadapi permasalahan rumah tangga serta ditemukannya bayi bahkan mayat bayi yang tidak berdosa yang dibuang karena hasil dari hamil yang tidak diinginkan.

Guna meantisipasi itu semua maka permasalahan ini perlu mendapat perhatian melalui kegiatan yang mendukung Program Pemerintah mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Untuk Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014-2017 telah ditargetkan terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak sebanyak 5 Desa/Kelurahan Layak Anak. Tercapai s/d akhir tahun 2017 sebanyak 4 Desa/Kelurahan Layak Anak atau 80 % dari Target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16. Capaian Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak

No	Tahun	Jml Desa/kel	Target	Tercapai	Prosentase
1	2014	201	0	0	0
2	2015	201	2	2	100 %
3	2016	201	1	1	100 %
4	2017	201	2	1	50 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase pencapaian terbentuknya

mencapai sebanyak 1,99 % dari jumlah Desa/Kelurahan yang ada. Untuk mencapai hasil yang maksimal maka kegiatan yang mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan kabupaten layak anak ini perlu dikolaborasikan dengan SKPD lain yang terkait dengan pencapaian Kabupaten Layak anak tersebut.

2.3.6. Hasil Penanganan Laporan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pada P2TP2A yang ditangani dan dilaporkan.

Kelompok pencegahan KDRT merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Prosentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin tinggi mendorong adanya upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, salah satunya dengan Pembentukan Kelompok Pencegahan KDRT (PIK Keluarga).

Di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014-2017 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 91 Kasus yang masuk, sedang target kinerja selama tahun 2014-2017 sebesar 71 kasus, Tercapai s/d akhir tahun 2017 yaitu kasus yang terselesaikan sebanyak 81 kasus atau tercapai sebesar 89,01 % dari jumlah kasus yang masuk atau 114,08 % dari target.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.17. Laporan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak yang ditangani pada P2TP2A di Kabupaten Barito Kuala

No	Tahun	Jml Kasus yang masuk	Target	Kasus yang terselesaikan	Prosentase
----	-------	----------------------	--------	--------------------------	------------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa prosentase pencapaian kasus yang terselesaikan setiap tahunnya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk, namun bila dibandingkan dengan target maka pencapaian kasus yang terselesaikan sangat baik karena melebihi dari yang ditargetkan.

2.3.7. Partisipasi SKPD yang melaksanakan PPRG

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Starnas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Dengan demikian PPRG merupakan bagian dari pelaksanaan PUG.

Dilakukannya Perencanaan Responsif Gender dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

Di Kabupaten Barito Kuala sejak Tahun 2014-2017 telah ditargetkan SKPD yang aktif berpartisipasi melaksanakan PPRG sebanyak 17 SKPD. Tercapai s/d akhir tahun 2017 sebanyak 11 SKPD atau 64,70 % dari target secara kumulatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.18. Partisipasi SKPD yang melaksanakan PPRG

3	2016	6	0	0 %
4	2017	6	6	100 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian partisipasi SKPD yang melaksanakan PPRG di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2014-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun bila dibanding dengan jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 33 SKPD maka pencapaian tersebut masih belum maksimal karena hanya mencapai 33,33 %.

2.3.8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBP3A

Dalam melaksanakan pembangunan daerah yang menunjang tercapainya visi dan misi kepala daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya telah menetapkan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun (2017-2022) dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKBP3A

2.4.1. Indikator Jumlah Penduduk.

Salah satu indikator keberhasilan program KB adalah terkendalinya jumlah pertambahan penduduk. Sehingga menghasilkan struktur penduduk yang jumlah penduduk Usia Produktifnya tinggi atau gemuk dibandingkan jumlah penduduk usia yang tidak produktif. Dari data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala maka dapat disajikan jumlah Penduduk yang ada di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
2014	147.366	146.743	294.109
2015	149.619	148.663	298.282

(Data BPS Kabupaten Batola)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara absolut jumlah penduduk Barito Kuala terus bertambah dari waktu ke waktu. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 maka ada peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala sebanyak 4.173 jiwa atau ada peningkatan sebanyak 1,42 % selama kurun waktu 1 tahun terakhir.

2.4.2. Indikator Penduduk Menurut Usia

Jumlah penduduk menurut kelompok usia tertentu penting diketahui agar pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan penduduk sebagai obyek pembangunan. Struktur usia menurut kelompok ini erat kaitannya dengan perilaku demografi terhadap aspek-aspek social ekonomi seperti : Pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dls.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang distribusi penduduk Kabupaten Barito Kuala

Jumlah Penduduk	294.109	298.282	4.173= 1,40 %	Tergolong Usia tua
Usia <15 tahun	85,486/29,07 %	86.691/29,06 %	1.205	Secara prosentase Turun 0,01 %
Usia Produktif 15- 64 tahun	196.458/66,78 %	199.245/66,80 %	2.787	Naik 0,02 %
>65 tahun	12.165/4,14 %	12.346/4,14 %	181	Secara prosentase tdk berubah

(Data BPS Kabupaten Batola)

Dari table diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014, Penduduk Kabupaten Barito Kuala tergolong dalam kelompok usia tua (Old Population), karena jumlah penduduk berusia 15 tahun ke bawah sebanyak 85.486 jiwa atau 29,07 % dari total jumlah penduduk dan kurang dari 35 %. Kondisi ini menunjukkan ada kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2015 yang menunjukkan angka sebesar 86.691 jiwa atau 29,06 %. Atau naik sebesar 1.205 jiwa. Namun secara prosentase mengalami penurunan sebesar 0,01 %.

Sebaliknya kelompok penduduk berusia 15-64 tahun (Usia Produktif) mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2014 kelompok ini sebesar 196.458 jiwa atau 66,78 %, dan pada tahun 2015 menjadi 199.245 jiwa atau 66.80 %, atau ada kenaikan sebanyak 2.787 jiwa selama kurun waktu 1 tahun, namun secara prosentase mengalami kenaikan sebesar 0,02 %.

Dari table diatas juga terlihat pula bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk berusia 65 tahun keatas (>65), dimana pada tahun 2014 berjumlah 12.165 jiwa atau 4,14 %, tahun 2015 menjadi 12.346 jiwa atau 4,14 %, kondisi ini menunjukkan ada kenaikan di kelompok umur tersebut sebanyak 181 jiwa namun secara prosentase tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 1 tahun.

kualitas SDM dimasa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.22. Penduduk Usia Balita (0-4 Tahun)

Uraian	2014	2015	Naik	Keterangan
0-4 tahun	30.132/10.24 %	30.978/10.38 %	846	Naik 0,14 %

Dari table diatas menunjukkan jumlah penduduk usia balita mengalami peningkatan sebesar 846 jiwa atau naik sebesar 0,14 %.

2.4.4. Indikator Penduduk Usia Remaja (10-19 tahun)

Remaja sebagai generasi penerus bagsa perlu disiapkan menjadi manusia yang sehat secara jasmani, rohani dan mental spiritual. Pada kelompok Usia Remaja ini masih banyak permasalahan yang dihadapi antara lain Rendahnya Usia Kawin Pertama Wanita, Kehamilan yang tidak diinginkan, Seksualitas Pranikah, Narkoba dls

Penduduk Remaja paling dinamis dalam angkatan kerja yang perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama kebijakan untuk penduduk remaja yang putus sekolah melalui peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan kesempatan kerja, dengan tidak melupakan program peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Perkembangan jumlah penduduk remaja di Kabupaten Barito Kuala dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.23.Penduduk Usia Remaja (10-19 tahun)

Uraian	2014	2015	Naik	Keterangan
10-19 tahun	50.731/17,25 %	51.451/17,25 %	720	Secara prosentase tidak berubah

Dari table diatas menunjukkan jumlah penduduk usia remaja mengalami peningkatan

Beberapa tahun kedepan Kabupaten Barito Kuala akan memasuki Bonus Demografi. Bonus Demografi adalah keadaan yang sedang dialami oleh suatu daerah dimana jumlah perbandingan penduduk usia kerja (15-65 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk bukan usia produktif (<15 th dan >65 th). Puncak bonus demografi akan dapat dinikmati apabila penduduk usia produktif berjumlah sekitar 70 % dari total jumlah penduduk.

Perkembangan penduduk usia produktif dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 2.24. Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)

Uraian	2014	2015	Naik	Keterangan
15-64 tahun	196.458/66,80 %	199.245/66,80 %	2.787	Secara prosentase tidak berubah

Dari table diatas menunjukkan jumlah penduduk usia produktif mengalami peningkatan sebesar 720 jiwa, namun secara prosentase tidak mengalami perubahan.

2.4.6. Indikator Penduduk Lanjut Usia (60 Tahun keatas)

Indikator keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya jumlah penduduk lansia akibat meningkatnya usia harapan hidup. Menurut data dari K/L Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Laki-laki untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015 63,05 dan penduduk perempuan 66,73. Tantangannya dengan bertambahnya jumlah lansia akan menimbulkan masalah oleh karena itu perlu perhatian dari pemerintah daerah. Perkembangan penduduk lanjut usia di Kabupaten Barito Kuala dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.25. Penduduk Lanjut Usia (60 Tahun keatas)

Uraian	2014	2015	Naik	Keterangan
Uraian	10.070/6,40 %	10.050/6,40 %	000	Nilai 0,04 %

2.4.7. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio Ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indicator, yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif, untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Demikian juga sebaliknya.

Untuk mengetahui perkembangan rasio beban ketergantungan (Dependency Ratio) penduduk Kabupaten Barito Kuala dapat disajikan dlm table berikut :

Tabel 2.26. Tren Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

No	Kelompok Umur	Tahun 2014	Tahun 2015
1	0 – 14	30.553	30.978
2	65 – keatas	12.165	12.345
3	15 – 64	196.458	199.245
4	Dependency Ratio	21.74	21.74

Dari table diatas menunjukkan bahwa angka ketergantungan mencapai 21,74. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berumur produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak 21 orang penduduk usia non produktif. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Barito Kuala relative rendah.

Secara kuantitatif jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala terus bertambah dan disertai dengan penambahan penduduk usia kerja (15-64 tahun), Namun ternyata jika dilihat dari angka rasio ketergantungan sejak tahun 2011 – 2015

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan dengan mengetahui Tantangan dan Peluangnya, dibawah ini kami uraikan beberapa Tantangan maupun Peluang dalam pengembangan Pelayanan SKPD sebagai berikut :

2.5.1. Tantangan Dalam Upaya Pengembangan Pelayanan DPPKBP3A

Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana yang ada serta tuntutan masyarakat dan SKPD lain yang membutuhkan pelayanan DPPKBP3A, maka kedepan perlu memaksimalkan potensi yang ada dan terus ditingkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran Program KB di Kabupaten Barito Kuala.

Dengan jumlah PKB/PLKB yang ada sebanyak 35 orang dan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 201, sehingga tidak dapat memenuhi harapan bahwa 1 (satu) PKB dapat membina 2 desa/Kelurahan. Kondisi saat ini rasio 1 (satu) PKB menangani 5-6 Desa/Kelurahan membuat kinerja PKB belum optimal dikarenakan kondisi wilayah geografis yang sangat beragam. maka kedepan harus terus meningkatkan jumlah Penyuluh KB (PKB) ditingkat Desa/Kelurahan yang merupakan ujung tombak Program KB.

Selain hal tersebut perlu pula meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada di lini lapangan seperti Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai pembina peserta KB di tingkat Desa/Kelurahan. Secara luas tantangan yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD termasuk dalam hal-hal sebagai berikut :

A. Pelayanan Keluarga Berencana.

Tantangan kedepan adalah membangun keluarga kecil berkualitas terutama pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat terlaksana sesuai dengan rencana maka perlu terus ditingkatkan sinergi kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan KB baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

B. Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Peningkatan Ketahanan Keluarga dilakukan melalui :

1. Meningkatkan akses informasi dan pelayanan dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui penggunaan internet dengan memanfaatkan fasilitas web site yang telah ada baik web site Pusat, Provinsi maupun Kabupaten untuk menginformasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan sehingga masyarakat dapat langsung mengakses informasi tersebut. Tantangan kedepan, kepada PLKB sebagai ujung tombak dari pelaksanaan program di lapangan yang langsung berhubungan dengan masyarakat diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat maupun SKPD lain yang membutuhkan informasi tersebut melalui laptop yang telah menjadi fasilitas PLKB dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas kelompok Bina Keluarga (BKB, BKR, dan BKL). Data perkembangan BKB, BKR, dan BKL kedepan dituntut kevalidannya, keakuratannya dan ketepatan waktu penyajiannya. Hal ini terkait dengan sasaran program dan kegiatan kepada kelompok Bina Keluarga yang

pembelajaran kewirausahaan khususnya Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS. 1) sehingga Keluarga tersebut mampu mencukupi kebutuhan minimal papan, pangan dan sandang sendiri.

4. Mengembangkan penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna bagi kelompok UPPKS. Kedepan kelompok UPPKS diberikan pelatihan dalam rangka pengembangan Alat Teknologi Tepat Guna, baik dibidang industri kecil maupun bidang pertanian.

C. Perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan serta pemberdayaan perempuan

Masih banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak tahun 2014-2017 sebanyak 91 kasus yang masuk dalam laporan aduan di P2TP2A Kabupaten Barito Kuala. Hal ini sangat memprihatinkan, kedepan tantangan yang harus dihadapi terkait dengan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan adalah meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan kepada masyarakat dan menerbitkan produk hukum tentang penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Barito Kuala dengan melibatkan stakeholder terkait. Hal ini diharapkan mampu menekan sekecil mungkin kasus tersebut.

Terkait dengan pemberdayaan perempuan sampai saat ini belum maksimal pengelolaannya, mengingat komposisi penduduk pada tahun 2015 berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala, penduduk perempuan lebih sedikit dibanding penduduk laki-laki dengan posisi 148.663 orang penduduk perempuan dan

gender pada semua SKPD, yang harus secepatnya dimulai dari tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Rencana tersebut hanya akan bisa terwujud dengan adanya komitmen yang kuat serta koordinasi antara pemegang kendali kebijakan daerah dengan pelaksana kebijakan.

2.5.2. Peluang yang ada dalam upaya Pengembangan Pelayanan DPPKBP3A

Dari tantangan yang harus dihadapi maka peluang yang ada harus diambil dalam upaya pengembangan pelayanan SKPD, beberapa peluang yang ada terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah :

- a. Komitmen Pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya revitalisasi program KB menjadi bagian dari prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019, yang harus ditindak lanjuti mulai dari Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota.
- b. Komitmen mitra kerja dengan lintas sektoral, Pemerintah Daerah, Swasta, LSM dan masyarakat sampai saat ini berpeluang untuk lebih ditingkatkan dalam mendukung kebijakan program KB Nasional di Kabupaten Barito Kuala.
- c. Ketersediaan alat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dari Pusat terutama untuk penduduk miskin selama ini masih tersedia dan akan terus didukung melalui pendanaan dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten sesuai kebutuhan.
- d. Peningkatan kompetensi provider bagi Bidan dan Dokter melalui pelatihan klinis IUD, MOP dan MOW serta pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pemberian *informed consent* sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan KB kepada masyarakat di klinik KB Pemerintah dan Swasta.

- f. Peningkatan pembinaan dan penggerakan lini lapangan dengan mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga lapangan dengan pelatihan maupun pembinaan organisasi profesi Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB).
- g. Tujuan Utama/Goals MDGs (*Millenium Development Goals*) salah satunya "Mendorong dan Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" dengan target memperkecil kesenjangan gender pada sekolah dasar dan sekolah menengah, hal ini wajib ditindak lanjuti dan didukung mulai dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.
- h. Berdasarkan data dan fakta tentang kondisi perempuan dan anak, terutama yang berkaitan dengan isu perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, pengabaian dan penelantaran, masih ada peluang untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban kekerasan, melalui komitmen yang kuat dengan lintas sektoral, LSM, Pelayanan yang telah dibentuk (P2TP2A), dan Pemerintah Daerah.
- i. Sifat gotong-royong masyarakat dan kepeduliannya terhadap kasus tindak kekerasan yang dapat dilihat dari adanya laporan dari masyarakat yang masuk merupakan peluang yang harus terus ditingkatkan dengan meningkatkan sinergi antara pelayanan terpadu dengan masyarakat luas untuk menghapuskan tindak kekerasan dan menolong korban-korban yang memerlukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKBP3A

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Potensi permasalahan pelayanan di daerah, pada umumnya timbul karena dari kekuatan yang ada belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan yang diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kerja dan faktor-faktor lainnya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan SKPD dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan yang akan diuraikan adalah untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi DPPKBP3A

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan SKPD)	EKSTERNAL (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Unmeet Need	13,91	Jumlah PUS IAT ditambah dengan PUS TIA / PUS yang tidak ber KB		Ratio Petugas PLKB dan PKB	Masih tingginya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB
Akseptor KB Baru	5.580	Jumlah Peserta KB Baru		Ratio Petugas PLKB dan PKB	- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk secara aktif mengikuti program KB - Luas wilayah garapan yang tidak sesuai dengan jumlah Petugas PLKB dan PKB

				dari pemerintah pusat	Keluarga Pra KS dan KS I alasan ekonomi
Persentase Partisipasi Pria dalam ber KB	1,98 %	Jumlah Peserta KB Pria / Jumlah Peserta KB Aktif		Alat Kontrasepsi untuk Pria sangat terbatas jenisnya sehingga tidak banyak memberikan pilihan bagi Pria	- Masih rendahnya minat pria untuk ber KB - Urusan ber KB sebagian besar masih diserahkan kepada urusan para wanita
Persentase partisipasi perempuan yg berperan dalam pembangunan TK	5,3 %	Jumlah perempuan yg berperan aktif / jumlah seluruh perempuan yg ada di desa P2WKSS dan GSI		Tingkat kesadaran wanita di desa dalam berperan dalam pembangunan masih rendah	- Kurangnya wanita pelopor yang dapat menggerakkan wanita agar dapat berperan dalam pembangunan di tingkat desa - Tingkat kesejahteraan perempuan yg masih rendah mempunyai kontribusi terhadap

dan GSI					
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	80,00 %	Pelayanan kepada korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak / Kasus yang masuk dalam pengaduan		Tingkat Pendidikan/ Pengetahuan, ekonomi dan social masyarakat masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Petugas tentang kebijakan-kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Tingkat kesejahteraan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga masih kurang
Capaian Score KLA	100	Hasil Evaluasi KLA berbasis Website		Belum semua anggota	- Belum adanya Perda KLA

				Tupoksinya	Kuala Layak Anak
--	--	--	--	------------	------------------

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta keterkaitannya dengan visi/Misi DPPKBP3A

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017-2022.

Adapun Visi Bupati dan Wakil bupati Terpilih Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera“**.

Memperhatikan visi tersebut diatas, kata kunci pertama yang termuat dalam visi adalah **membangun desa**. Kalimat membangun desa merefleksikan meningkatnya peran masyarakat bersama-sama pemerintah daerah untuk mengupayakan kerja nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat pedesaan sehingga lima tahun kedepan dicita-citakan wajah desa akan mengalami perubahan baik itu perubahan dibidang infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka serta meningkatkan kemapanan perekonomian daerah sehingga menjadikan kabupaten terdepan dalam mensejahterakan rakyatnya.

Kata Kunci kedua dari visi diatas adalah **menata kota**, Menata kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai ibukota Kabupaten Barito Kuala dan kota kecamatan yaitu

Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota dapat dilaksanakan secara baik dan berkelanjutan sehingga lima tahun kedepan nantinya dapat **terwujud Kabupaten Layak Anak** yang merupakan sasaran strategis dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Untuk mencapai Visi tersebut maka diupayakanlah melalui beberapa Misi yang telah disusun sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Keterkaitan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pada misi ketiga “ **Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas** Sumberdaya Manusia “dengan tujuan “ **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil dan agamis** “ dan Indikatorsasaran pada RPJMD yang didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **Meningkatnya Angka Harapanhidup** di Kabupaten Barito Kuala.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (BKKBN) Pusat.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam membahas integrasi penduduk dan pembangunan yaitu :

- 1). Penduduk tidak hanya diperlukan sebagai obyek tetapi juga subyek pembangunan. Paradigma penduduk sebagai obyek telah mengeliminir partisipasi penduduk dalam pembangunan.
- 2). Ketika penduduk memiliki peran sebagai subyek pembangunan, maka Keluarga diperlukan upaya pemberdayaan untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan. Hal ini menyangkut "Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas "

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintah periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu "**Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia**" melalui "Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana" kemudian di dalam Strategi

Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan strategi serta upaya yang optimal dalam penggarapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Terutama melalui upaya pencapaian target/sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Adapun arah dan kebijakan pembangunan nasional disusun berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan berpedoman pada visi dan misi pembangunan 2015-2019.

Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) Pemerintah 2015-2019 yang didukung BKKBN dalam melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah sebagai berikut :

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
3. Melakukan revolusi karakter bangsa.

3.3.1.a. Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana K/L BKKBN (RPJMN 2015-2019) :

Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN

PROGRAM	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Pengendalian Penduduk	Pengintegrasian isu kepdck dalam perencanaan pembangunan daerah	Mengembangkan Kajian dan Model Solusi Strategis Dampak Kependudukan
	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan dan performance stakeholders dlm	Menjadikan BKKBN sebagai Pusat Informasi Kepddkan yg handal dan terpercaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat ttg

	pengendalian penduduk	
	Pengintegrasian materi pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, non formal, informal	Meningkatkan kerjasama Pendidikan Kependudukan
	Peningkatan akses masy thd data dan informasi kependudukan (parameter, profil dan proyeksi).	Mengembangkan kemampuan SDM internal BKKBN & mitra kerja utama dlm konteks kependudukan
	Implementasi kebijakan dan model solusi strategis hasil analisis dampak kepdudukan	Mengembangkan advokasi isu-isu pembangunan berwawasan kependudukan
Pelayanan KB KR	Meningkatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas	Penguatan dan pemanduan kebijakan dlm sistem SJN Kesehatan
		Penggerakan pelayanan MKJP serta KB Pasca persalinan dan Pasca keguguran
		Peningkatan jaminan ketersediaan alokon dan sarana pelayanan KB
		Peningkatan pelayanan secara statis dan bergerak di DTPK
		Peningkatan kapasitas tenaga medis & penguatan kapasitas tenaga lapangan untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB
		Promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi

		Meningkatkan pembinaan ketahanan remaja
		Meningkatkan pembinaan keluarga lansia dan rentan
		Meningkatkan pembinaan ekonomi keluarga Pra KS

3.3.1.b. Strategi K/L BKKBN PUSAT (RPJMN 2015-2019)

1. Angka Kelahiran Total / TFR per WUS 15-49 tahun sebesar 2,28 %
2. Persentase pemakaian kontrasepsi / CPR semua metode = 66,0 %
3. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi sebesar 24,6 %
4. Meningkatnya penggunaan MKJP sebesar 23,5 %
5. Persentase Kebutuhan ber KB yg tdk terpenuhi/Unmet Need sebesar 9,91 %

3.3.1.c. Rancangan Program & Kegiatan Prioritas K/L BKKBN Pusat

Tabel 3.3 RKP, Program dan Kegiatan

RKP	Program	Kegiatan
Mengendalikan LPP dan mewujudkan Keluarga	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB/KR	Peningkatan pembinaan kesertaan KB era JKN
		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi.
		Peningkatan pembinaan KB di wilayah...

Ketahanan Keluarga dan Remaja	Pembinaan ketahanan keluarga remaja
	Pembinaan Generasi Berencana
	Pemberdayaan ekonomi keluarga
	Pembinaan ketahanan keluarga lansia & rentan
Penguatan Advokasi dan KIE	Peningkatan intensitas & kualitas advokasi dan KIE
	Penyediaan data dan informasi berbasis TI
	Penyediaan layanan teknologi, informasi dan dokumentasi program KKBPK
Penguatan Kemitraan dan Penggerakkan	Peningkatan kerjasama & pelayanan integrasi program KKBPK di Kampung KB
	Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kera
	Peningkatan kualitas pengelolaan & pembinaan lini lapangan
Pengendalian Penduduk	Pengembangan kerjasama pendidikan kependudukan
	Pemanduan kebijakan pengendalian penduduk
	Pemanfaatan hasil analisis dampak kependudukan
	Perencanaan Pengendalian Penduduk

3.3.2. Telaahan Renstra BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan

Keterkaitan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan agenda prioritas Nawa Cita terkait pada prioritas ke 3,5,8 sbb

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

1. Revitalisasi Program KB
2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Peningkatan ketersediaan kualitas data serta informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu

3.3.2.b. Strategi Pembangunan KKB BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KKB
2. Penataan pengendalian kependudukan
3. Peningkatan akses dan kualitas KB-KR
4. Memperkuat SDM Operasional program KKB
5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana program
7. Meningkatkan pembiayaan program KKB melalui :

3.3.2.c. Sasaran Strategis BKKBN Provinsi Kal Sel (Renstra 2015-2019)

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,47 %
2. Meningkatkan prevalensi kontrasepsi modern (CPR) = 66,12 %
3. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / DO sebesar 25,00 %.
4. Menurunnya kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need) sebesar 6,00 %
5. Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP sebesar 10,39 %
6. Meningkatnya peserta KB Aktif (peserta KB Aktif tambahan) sebesar 13.450 orang

RKP	Program	Kegiatan
Mengendalikan LPP dan mewujudkan keluarga berkualitas	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB/KR	Fasilitasi kegiatan KB/KR bersama KODIM, POLRI, Mitra Kerja.
		Pelayanan KB melalui bhaksos TNI, TMMD, bersama Mitra Kerja Akbid dan PT kesehatan
		Sosialisasi Standarisasi Pelayanan KB dan Peningkatan akses dan kualitas penggerakkan pelayanan KB dengan JKN
		Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
		Pelayanan Tim KB Keliling Provinsi/Kab/Kota, Kec dan Desa
		Pemantapan peran mitra kerja dalam promosi dan konseling kesehatan reproduksi bagi toma dan toga
		Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Remaja
Orientasi Kader Pintar BKB TK Provinsi/Kabupaten		
Ajang Kreatifitas Remaja		
GenRe Goes to School / Campus		
Sosialisasi Lansia Tangguh		
Fasilitasi Galeri UPPKS TK Kab/Kota		
Gelandang Dagang UPPKS		
Penguatan Advokasi dan KIE		Pengembangan dan produksi media advokasi KIE KKB
		Survey kependudukan, KB dan KR di kalangan remaja
		Orientasi / Desiminasi Program KKRPK bagi petugas

	Penggerakkan	Pembentukan Kampung KB (Road Map Pencanangan Kampung KB setiap kec
		Temu kader PKK dalam rangka pelaksanaan Intervensi keg di Kampung KB dengan lintas sektor
		Lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK Kes
		Updating data keluarga
		Inventarisasi Faskes dan Jejaring KB
		Laporan Pengendalian lapangan dan pelayanan kontrasepsi online
	Pengendalian Penduduk	Kerjasama penerapan materi kependudukan di Perguruan Tinggi
		Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader di Kampung KB
		Fasilitasi keg dg mitra kependudukan (PSK, KK Fapsedu Kab/Kota
		Lomba Pidato dan Karya Tulis Materi Kependudukan bertema Pendidikan Kependudukan
		Sosialisasi pendidikan kependudukan kepada guru
		Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk bagi Generasi Muda TK Provinsi
		Pengembangan Profil dan Proyeksi Indikator sasaran program KKBPK TK provinsi di Kab/Kota

Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan.
3. Penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
4. Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional dan daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, maka disusunlah Arah kebijakan dan strategi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut :

3.3.3.a. Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran K/L Bidang PP

Tabel 3.5. Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran Bidang PP

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang Pembangunan	Peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan ttg pentingnya pengintegrasian perspektif gender	Meningkatnya IPG
		Penerapan PPRG di berbagai bd pembangunan	Meningkatnya IDG
		Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha ttg Kesetaraan gender	

	kekerasan, termasuk TPPO	penegakan hukum. Peningkatan efektifitas layanan bagi perempuan korban kekerasan	terhadap perempuan
3	Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan KtP	Penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan KtP	Ketersediaan prasyarat 7

3.3.3.b. Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran K/L Bidang PA

Tabel 3.6. Arah kebijakan, Strategi, Sasaran Bidang PA

No	Arah Kebijakan	Strategi	Sasaran
1.	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas	Pemerataan dan ketersediaan layanan dasar	Cakupan akta kelahiran
		Layanan PAUD-HI bagi seluruh anak	Layanan pendidikan
		Percepatan kepemilikan akta kelahiran	Imunisasi
		Kegiatan kreativitas dan bakat anak	Partisipasi anak
		Pengawasan materi dan akses informasi layak anak	SRS
		Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak	RKA
		Advokasi dan sosialisasi lingkungan ramah anak	
		Upaya perwujudan KLA termasuk di dalamnya SPA	

		perkawinan di usia anak	penanganan kasus
		Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif	
		Penyusunan strategi dan materi KIE	
		Advokasi dan sosialisasi ttg pentingnya melindungi anak	
		Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak	
		Peningkatan efektifitas layanan anak korban kekerasan	
3	Meningkatkan efektifitas kelembagaan PA	Penguatan dan harmonisasi perundang-undangan	Data, kebijakan
		Peningkatan koordinasi.	Layanan, tenaga
		Penguatan sistem manajemen data dan informasi	Koordinasi
		Peningkatan kapasitas SDM yang memberikan layanan	Efektifitas pengawasan

3.3.3.c. Kegiatan Prioritas K/L Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.7. Kegiatan Prioritas dan Sasaran

KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN
Pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui pemberdayaan ekonomi	Pusat pemberdayaan perempuan (Sekolah perempuan,wtc)
	Pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan, korban perdagangan org dan korban bencana

kesetaraan gender dan hak anak	Pengasuhan berbasis Hak Anak
	Legislasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak
Peningkatan komitmen dalam perlindungan perempuan dan anak	Penguatan GT PTPPO
	Sos UU No 17 th 2006 ttg penetapan Perpu No 1 th 2006 dan perundang-undangan yg terkait
	RUU PKS
	Analisis SPHPN 2016
	Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
	Kampanye BERLIAN (Bersama Lindungi Anak)
	Survei Kekerasan thd anak (SktA)
Pemenuhan Hak Anak	Penguatan Kab/Kota Layak Anak (KLA) hingga tk.Des
	Pengembangan sarana publik ramah anak : TeSA 129, PISA, RASS, RBRA, PRA, SRA, PKA
	Penguatan partisipasi anak melalui forum anak: 2P/PAPP
	Promosi pemenuhan hak anak: KIE Tematik
Peningkatan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Fasilitasi layanan pendampingan bagi korban
	Hibah kendaraan (MOLIN/TORLIN)
	Advokasi pembentukan UPTD PPA

	Sinergitas program antar LM
	Peningkatan kapasitas LM dalam akses sumber daya
	Jelajah 3 Ends

3.3.4. Telaahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan

Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas PP PA Provinsi Kalimantan selatan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Strategi dan Kebijakan

Misi 1 : Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan.

Strategi	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak
Mengembangkan penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Bimbingan teknis penyusunan GAP, GBS dan TOR yg Responsif Gender
Meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur sbg fasilitator PPRG di setiap SKPD Prov Kal Sel dan di Kab	Asistensi penyusunan program kegiatan dan anggaran Responsif Gender (ARG)
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG Kab/Kota

Misi 2 : Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

Strategi	Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan
Meningkatkan keterlibatan	Pelatihan tenaga penvuluh perkawinan usia

pemberdayaan ekonomi perempuan	
Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)	Pembinaan dan evaluasi model desa prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Meningkatkan keterampilan perempuan dalam usaha/industri rumahan	Gerakan peningkatan kualitas keluarga
	Monitoring & Evaluasi P2WKSS & GSI
	Pelatihan keterampilan industri rumahan bagi perempuan
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Pelatihan PUG bagi lembaga / organisasi masyarakat & dunia usaha
	Pelatihan KKG bidang politik bagi perempuan
	Pemerataan hasil karya perempuan di bidang pembangunan
	Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Misi 3 : Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.

Strategi	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
-----------------	--

pidana perdagangan orang	
Meningkatkan layanan P2TP2A	Sistem Informasi Gender dan Anak
Meningkatkan kapasitas SDM petugas terlatih pd P2TP2A dlm pencegahan dan penanganan perlindungan thd tindak kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Pelatihan kader dan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
Meningkatkan koordinasi pengelolaan dan penyajian data gender dan anak	Sosialisasi dan workshp up dating data e-kekerasan perempuan & anak
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.
	Pencatatan dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
	Pelatihan pendampingan perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
	Perumusan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
	KIE perlindungan dari tindak kekerasan bagi perempuan dan anak

	Rencana Aksi Daerah TPPO
	Bintek Pencegahan dan penanganan korban KDRT dan Seksual
	Sos perlindungan perempuan dan pendamping TPPO
	Rakor pencegahan dan penanganan TPPO
	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan koordinasi pemangku kepentingan dalam Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Parenting Pemenuhan Hak Anak
Mengembangkan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pelatihan tenaga terlatih pemenuhan Hak Anak dalam pengembangan sekolah ramah anak
Meningkatkan kapasitas SDM gugus tugas KLA	Monitoring dan evaluasi Kab Layak Anak klaster pendidikan
	Asistensi pengembangan Kab Layak Anak
	Penyuluhan Pemenuhan Hak Anak di Posyandu
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

	Posyandu
	Pelatihan konvensi Hak Anak bg petugas di faskes
	Moniva Kab Layak Anak klaster Kes
	Peningkatan peran lembaga masy dunia usaha dan media massa di Kab Layak Anak
	Advokasi dan Edukasi Rumah Sakit Ramah Anak
	Sos Hak Anak dan Perlindungan anak
	Advokasi dan Edukasi hak partisipasi anak dalam politik

3.3.4.a. Prioritas Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan :

1. Upaya penurunan angka pernikahan usia anak.
2. Meningkatkan partisipasi anak disetiap jenjang pendidikan.
3. Peningkatan komitmen kepala SKPD untuk mendorong pengarusutamaan gender.
4. Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
5. Perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
6. Perlindungan anak dan pemenuhan haknya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (untuk selanjutnya disebut Permendagri 67/12). Dalam penyusunan KLHS ini dilakukan dengan menggunakan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.

KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, program (KRP). Kemudian pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah suatu upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia dengan cara : (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya : (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang : (c) memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar pelaksanaan KLHS merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia, yang meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.

Melalui pelaksanaan KLHS diharapkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala dapat benar-benar terealisasi. Secara geografis kondisi eksistengnya, Kabupaten Barito Kuala dikenal sebagai wilayah agraris yang merupakan penyumbang ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan selatan, adalah sebuah kondisi yang perlu dipertahankan melalui Kebijakan Rencana Program (KRP) yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala sudah sesuai dengan RT / RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan RT/RW adalah tersedianya dana yang cukup untuk membiayai setiap program pembangunan Kabupaten yang telah dirumuskan. Ketersediaan pembiayaan pembangunan Kabupaten tergantung kepada kondisi sumber-sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, baik berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun berupa bantuan pusat dan bantuan yang diperoleh dari pemerintah provinsi serta penerimaan dari sumber-sumber yang sah. Mengamati hal-hal tersebut, mendorong Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1. Isu Strategis K/L BKKBN Pusat

Beberapa Isu Strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 yang perlu mendapat perhatian khusus dapat di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Permasalahan dan Isu Strategis K/L BKKBN pusat

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program KKBPK	Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders thd program KKBPK yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran. Masih tingginya jml anak yg diinginkan dr setiap keluarga Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, ditandai dg pengetahuan ttg KB dan alat kontrasepsi sangat tinggi.

		Masih terjadinya kesenjangan dlm memperoleh informasi ttg prg KKBPk baik antar provinsi, atr wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga.
		Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yg belum responsif gender, tergambar dg masih dominannya peran suami dlm pengambilan keputusan utk ber KB
		Muatan dan pesan dlm advokasi dan KIE blm dipahami secara optimal
		Peran Bidan dan tenaga lapangan KB dlm konseling KB belum optimal
2	Peningkatan akses dan Kualitas Pelayanan KB	Angka pemakaian kontrasepsi cara moderen tidak meningkat secara signifikan.
		Kebutuhan ber KB yg tdk terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi.
		Masih terdapat kesenjangan dlm kesertaan ber KB (CPR) dan kebutuhan ber KB yg blm terpenuhi baik antar provinsi / antar wilayah
		TK putus pakai penggunaan kontrasepsi (DO) masih tinggi
		Penggunaan alkon non MKJP terus meningkat
		Penggunaan alkon MKJP terus menurun

		fasilitas pelayanan KB, terutama dlm rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Kesehatan
3	Pemahaman & kesadaran remaja mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja	<p>Angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi</p> <p>Masih tingginya perkawinan usia muda</p> <p>Terdapat kesenjangan dlm pembinaan pemahaman remaja ttg Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja.</p>
4	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<p>Masih tingginya keluarga miskin</p> <p>Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yg baik dan tumbuh kembang anak masih rendah</p> <p>Partisipasi pemahaman dan kesadaran keluarga/ortu yg memiliki ramaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah</p> <p>Kualitas hidup lanjut usia (lansia) dan kemampuan keluarga dlm merawat lansia masih belum optimal</p> <p>Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>
		Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan blm optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian

		Terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.
5	Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB	Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah thd kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah. Koordinasi pembangunan bidang KKB dg program pembangunan lainnya masih lemah. Serta penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.
6	Penguatan data dan informasi Kependudukan KB dan KS	Data sektoral yg diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB dan KS belum dpt digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK Sistem pengolahan data masih kurang berkualitas

3.5.2. Isu Strategis BKKBN Provinsi

1. Pencapaian CPR belum sesuai harapan.
2. Unmet Need masih tinggi.
3. Peningkatan Age Specific Fertility Rate (ASFR)
4. TFR masih tinggi.
5. Disparitas pencapaian program KB Nasional di Kabupaten.
6. Jumlah dan pertumbuhan penduduk masih tinggi.

11. Kesiapan pelayanan KB dalam menyongsong era BPJS.
12. Posisi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)

3.5.3. Isu Strategis DPPKBP3A Kab. Barito Kuala

Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan tingginya angka drop out peserta KB.
2. Perkawinan usia muda yang tinggi mengakibatkan angka kematian ibu dan bayi tinggi.
3. Pencapaian CPR / KB Aktif belum sesuai harapan.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk masih tinggi.
5. Unmet Need masih tinggi.
6. Tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi MKJP menurun.
7. Persepsi masyarakat tentang MKJP beragam dan belum seperti yang diharapkan.
8. Masih rendahnya kualitas IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) sebagai ujung tombak pengelola program keluarga berencana.
9. Keikutsertaan PUS dalam ber KB masih belum responsive gender
10. Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsif Gender ke dalam Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
11. Rendahnya keikutsertaan perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan dan ketrampilan serta pendampingan

14. Masih rendahnya jumlah institusi Layak Anak.
15. Masih rendahnya peran Forum Anak Desa dalam perencanaan pembangunan.
16. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
17. Masih rendahnya kualitas kelompok kegiatan bina keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS).
18. Masih rendahnya kualitas data base keluarga.
19. Rendahnya pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) tentang BKB, BKR, BKL, dan UPPKS bagi pengelola.
20. Keterbatasan akses modal usaha bagi Kelompok UPPKS terutama anggota dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Berdasarkan hasil analisis isu strategis yang ada maka diambil kesimpulan untuk menentukan 3 isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan berdasarkan urusannya antara lain sebagai berikut :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
Isu Strategis yang diusungnya adalah masih tingginya Angka Laju Pertumbuhan Penduduk dan masih tingginya Unmeed Need
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan :
Isu Strategis yang diusungnya adalah masih Rendahnya Peran Perempuan dalam Pembangunan
3. Urusan Perlindungan Anak :
Isu Strategis yang diusungnya adalah masih tingginya Angka Kekerasan Terhadap Anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah **“Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang menuju keluarga sejahtera, mandiri dan berdaya saing”**

Penjelasan makna dari Visi tersebut adalah :

1. Penduduk Tumbuh Seimbang

Keadaan dimana jumlah penduduk tidak bertambah maupun berkurang sehingga mencapai keseimbangan yang dinamis antara kekuatan – kekuatan yang menambah dan kekuatan – kekuatan mengurangi jumlah penduduk.

2. Keluarga Sejahtera

Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang sama, selaras, seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

3. Mandiri

Merupakan “kondisional” masyarakat dan “sikap perilaku” yang juga menjadi “budaya” masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Dan dengan keberdayaannya, diharapkan masyarakat dapat melakukan proses pembangunan yang lebih memberikan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

4. Berdaya Saing

mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakannya yang harus diemban dan dilaksanakan.

Misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Reproduksi Remaja
2. Pemberdayaan dan penggerakan masyarakat untuk membangun keluarga sejahtera
3. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
4. Peningkatan kualitas data mikro dan informasi keluarga.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

Tujuan sifatnya lebih kongrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik tercapainya hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran nyata dari perumusan visi dan misi.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

❖ Tujuan

1. Mewujudkan keberlangsungan ber KB sertameningkatkankualitas KIE dan pelayanan KB/KR sertamengendalikan angkakelahiran.
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

❖ Indikator Tujuan

1. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun focus utama dari sasaran adalah tindakan dan lokasi sumber daya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil. Berdasarkan uraian di atas maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan sasaran serta indikator sasaran yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD sebagai berikut :

❖ Sasaran :

1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Meningkatnya Kesetaraan Gender
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak.

❖ Indikator Sasaran :

1. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Unmeet Need
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
4. Score Capaian Kabupaten Layak Anak.

Secara umum tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.1. (C.25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPPKBP3A

Tabel 4.1 (C.25)

Tujuandan Sasaran DPPKBP3A Tahun 2017 – 2022(IKU Eselon II)

	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
	4	5	6	7	8	9	10	11	12
u h du	Target Tahun Ini – (Realisasi Tahun Ini – Target Tahun Ini) / Target Tahun Ini * 100	Sasaran. 1 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Indikator Sasaran. 1 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Target Tahun Ini – (Realisasi Tahun Ini – Target Tahun Ini) / Target Tahun Ini * 100	1,41	1,40	1,39	1,38	1,37
			Indikator Sasaran. 2 Unmeet Need		13,06	12,21	11,36	10,51	9,66
gu	Target Tahun Ini – (Realisasi Tahun Ini – Target Tahun Ini) / Target Tahun Ini * 100	Sasaran. 2 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indikator Sasaran. 3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Target Tahun Ini – (Realisasi Tahun Ini – Target Tahun Ini) / Target Tahun Ini * 100	88,61	88,11	87,61	87,11	86,61
K n a	Realisasi tahun ini : Target x 100	Sasaran. 3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indikator Sasaran. 4 Score Capaian KLA	Realisasi tahun ini / Target tahun ini x 100	300	350	550	600	650

Tabel 4.2 (C.25)

Sasaran dan Indikator Sasaran Program DPPKBP3A Tahun 2017 – 2022 (IKU Eselon III)

Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Formulas / Perhitungan Indikator Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ini				
					2018	2019	2020	2021	2022
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sasaran. I Terkendali ny Laju Pe rtumbuha n Pendudu k	Indikator Sasaran Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Penggerak Keluarga Berencana	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 th)	Jml kelahiran kel umur 15-19 th / Jml perempuan kel umur 15-19 th pd pertengahan thn yg sama x 100	55,98	54,98	53,98	52,96	51,98
			Persentase desa yang melaksanakan KIE secara efektif	Jml desa sasaran KIE / Target th ini x 100	20	30	40	50	60
			Persentase data program KKBPK yg tersedia	Jml dokumen Umpan Balik yg dibuat / Target thn ini x 100	20	25	30	35	40
			Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu-isu kependudukan	Jml Masyarakat yang mengetahui isu kpddk / Target thn ini x 100	30	35	40	45	50
	Indikator Sasaran. Unmeet Need	Meningkatnya Efektivitas Keluarga Berencana	Persentasi KB Aktif	Jml peserta KB / Jml PUS x 100	78,87	80,87	82,87	84,87	86,87
			Persentase KB Pria	Jml peserta KB Pria / Jml peserta KB Aktif x 100	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16

			Persentase KB MKJP	Jml peserta KB MKJP / Jml peserta KB x 100	13,47	14,47	15,47	16,47	17,47
			Persentase PUS yg meningkat pemahamannya tentang ketahanan keluarga	Jml keluarga yang mendapatkan pemahaman KK / Target thn ini x 100	0	0	35	45	55
			Persentase Anggota Kelompok BKB Yang Ber-KB	Jml anggota BKB yg ber KB / Jml PUS anggota kelompok BKB x 100	86,68	87,18	87,68	88,18	88,68
			Persentase Anggota Kelompok BKR Yang Ber-KB	Jml anggota BKR yg ber KB / Jml PUS anggota kelompok BKR x 100	88,22	88,42	88,62	88,82	89,02
			Persentase Anggota Kelompok UPPKS Yang Ber-KB	Jml anggota UPPKS yg ber KB / Jml PUS anggota kelompok UPPKS x 100	86,50	86,70	86,90	87,10	87,30
Sasaran. 2 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indikator Sasaran. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Kelembagaan PUG	Persentase Kelembagaan yang aktif dalam pembangunan Gender	Jml SKPD yg aktif dlm PUG / Target sasaran thn ini x 100	30	20	20	15	15
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan yang berperan dalam pembangunan di tingkat desa	Jml perempuan yg aktif dlm pembangunan Tk desa / Target sasaran thn ini x 100	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87

Sasaran. 3 Meningkat nyaPerlind unganPer empuanda nAnak	IndikatorSas aran. Score Capaian KLA	Meningkatny aefektifitaskel embagaanpe rlindunganper empuandana nakdariberba gaitindakkeke rasan	Persentaseperempua ndananak korban kekerasan yang mendapatkanpenang ananpengaduan	Jml korban kekerasan yang ditangani / jml korban kekerasan yg mengadu x 100	100	100	100	100	100
		Meningkatny ajumlahkele mbagaan PUHA di desa / kelurahan	Persentase desa yang memiliki forum anakdesa	Jml desa yg memiliki FAD / Target sasaran thn ini x 100	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Tabel 4.3 (C.25)

Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan DPPKBP3A Tahun 2017 – 2022 (IKU Eselon IV)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran Program	Indikator Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Formulasi Perhitungan Indikator Kegiatan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
								2018	2019	2020	2021	2022
5	6	7	8				8	9	10	11	12	
1	Sasaran 1 Terkenalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Indikator Sasaran. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Penggerak Keluarga Berencana	Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 th)	Penyuluhan, Pembinaan dan penggerak masyarakat	Jumlah Peserta yang dibangun dalam Kegiatan Bhaksos TMKK dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Realisasi th ini / Target thn ini x 100	400	600	600	600	600
				Persentase desa yang melaksanakan KIE secara efektif		Jumlah Kampung KB Yang dibangun	Jml Kampung KB yg dibangun / Target th ini x 100	14	14	14	14	14
				Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan		Jml PPKBD dan Sub yang diberdayakan / Target th ini x 100	0	0	201	201	201	

			Persentas edata program KKBPK yg tersedia	Pembuata nDokume nUmpanB alik KKBPK	JumlahDoku menUmpan Balik	Jml dokumen umpan balik / target sasaran th ini x 100	12	12	12	12	12
				Pengelola an Data Keluarga di tingkatdes a	Jumlah Data Keluarga yg tersedia di tingkatDesa	Realisasi th ini / Target thn ini x 100	0	0	35	35	35
			Persentas emasyara kat yang mengetah uitentangi su- isukepend udukan	Pembinaa nKualitas Kependud ukan	Jumlahmasy arakat yang di tingkatkanp engetahuant entangisuisu kependuduk an	Realisasi th ini / Target thn ini x 100	120	850	850	850	850
Indikator Sasaran. Unmeet Need	Meningkat nya Efektifitas Keluarga Berencan a	Persentasi KB Aktif	Pembinaa n dan penguatan keluarga berencana	Jumlah desa yang di lakukan Pembinaan KB MKJP	Jml desa yg dibina / Target thn ini x 100	17	17	17	17	17	
				Jumlah peserta KB IUD dan Implant yqng dilayani	Jml peserta IUD dan Implant yg dilayani / Target thn ini x	0	0	500	500	500	

					100						
			Persentase KB Pria		Jumlah peserta KB Pria	Realisasi tahun ini / target tahun ini x 100	920	955	990	1025	1060
			Persentase KB MKJP		Jumlah Akseptor MOP dan MOW yang dilayani	Jml peserta MOP dan MOW yang dilayani / Target x 100	42	45	50	55	60
			Persentase PUS yg meningkatkan pemahamannya ttg ketahanan keluarga	Pembinaan Ketahanan keluarga	Jumlah Keluarga yang dilakukan penguatan ketahanan keluarga	Realisasi tahun ini / target tahun ini x 100	0	0	250	250	250
			Persentase Anggota Kelompok BKB Yang ber-KB		Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	Jml anggota kel BKB yg ber KB / Jml PUS anggota kel BKB x 100	4940	4990	5040	5090	5140
			Persentase Anggota Kelompok BKR Yang Ber-KB		Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	Jml anggota kel BKR yg ber KB / Jml	2134	2193	2243	2293	2343

						PUS anggota kel BKR x 100						
						Jumlah sekolah yang mendapatkan KRR	Jml sekolah yg mendapatkan Orientasi / Target th ini x 100	0	0	6	7	7
				Persentase Anggota Kelompok UPPKS Yang Ber-KB		Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB	Jml anggota kel UPPKS yg ber KB / Jml PUS anggota kel UPPKS x 100	834	849	864	879	894
	Sasaran. 2 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indikator Sasaran. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Kelembagaan PUG	Persentase Kelembagaan yang aktif dalam pembangunan Gender	Meningkatnya pengelolan perberdayaan dan perlindungan perempuan	Jumlah SDM perencana SKPD terlatih dalam PPRG	Jml SDM perencana PPRG / Target ssaran th ini x 100	24	20	20	15	15

		Meningkatnya kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan yang berperand alampemb angunan di tingkatdes a	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam P2WKSS	Jumlahperempuan yang aktifdalam pelaksanaan program P2WKSS	Jml perempuan yg aktif dalam P2WKSS / Target th ini x 100	70	70	70	70	70
				Meningkatnya peran sertamasyarakatdalam GSI	Jumlahperempuan yang terlibatdalam pelaksanaan program GSI	Jml perempuan yg terlibat di GSI / Target thn ini x 100	150	150	150	150	150
				Meningkatnya kualitas perempuan dan organisasi	Jumlah kegiatan organisasi perempuan	Jml kegiatan organisasi perempuan / Target th ini x 100	2	2	2	2	2
Sasaran. 3 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Indikator Sasaran. Score Capaian KLA	Meningkatnya efektifitas lembaga perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Persentase perempuan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pen gaduan	Meningkatnya perlindungan anak	Jumlahkelompok Pencegahan KDRT yang dibentuk	Jml kelompok KDRT yg dibentuk / Target th ini x 100	7	7	7	7	7
					Jumlahkasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di layani	Realisasi tahun ini / target tahun ini x 100	15	15	15	15	15

		Meningkat nyajumlah kelembag aan PUHA di desa / kelurahan	Persentas edesa yang memiliki forum anakdesa		Jumlahdesa yang berpartisifasi dalam Forum Anak Daerah	Realisasi tahun ini / target tahun ini x 100	7	7	7	7	7
					Jumlahrapat koordinasia nggotagugu stugas KLA	Jml Rapat yg dilaksana kan / Target th ini x 100	0	2	2	2	2

selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara DPPKBP3A mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPPKBP3A. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala.

Tabel 5.1 (C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI RPJMD	Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)		
Misi ke III RPJMD	Meningkatnya Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		
IKU RPJMD	Meningkatnya Usia Harapan Hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Mewujudkan keberlangsungan ber KB serta meningkatkan kualitas KIE dan pelayanan KB/KR serta mengendalikan angka kelahiran	Sasaran 1.1 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Strategi 1.1 Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KKB melalui penyediaan dan penyebaran data dan informasi	Kebijakan 1.1 Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dan peningkatan KIE serta ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai dan akurat
		Strategi 1,2 Memperluas jangkauan serta mewujudkan pelayanan KB yang berkualitas dan merata	Kebijakan 1.2 Menguatkan advokasi KKBPK dan meningkatkan akses serta pelayanan KB yang merata dan berkualitas

		Strategi 2.2 Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Kebijakan 2.2 Pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Tujuan 3 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Sasaran 3.1 Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Strategi 3.1 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	Kebijakan 3.1 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan
		Strategi 3.2 Memperkuat lembaga serta meningkatkan koordinasi kegiatan pemenuhan Hak Anak	Kebijakan 3.2 Pemenuhan Hak Anak dengan focus pada percepatan pencapaian KLA

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indicator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indicator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal satu urusan atau program bersifat strategis maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Demikian pula dalam penganggaran harus mendapatkan prioritas secara proporsional. Suatu urusan menjadi strategis akan sangat tergantung pada tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Selanjutnya pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kegiatan, dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala, yang merupakan program prioritas yang ada di RPJMD 2017-2022 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBP3A. Rencana program prioritas beserta indikator kinerja dan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala.

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan – kebijakan yang telah

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1.1. Program dan Kegiatan Strategis Bidang Pengendalian Penduduk dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan serta indikator kinerja (Output)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
1	Meningkatnya Penggerakan Keluarga Berencana	Penyuluhan, Pembinaan dan Penggerakan Masyarakat	Jml peserta yg dibina dan digerakkan dlm keg bhaksos TMKK dan Kesatuan gerak PKK KB KES
			Jumlah kampung KB yang dibina
			Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan
		Pembuatan Dokumen Umpan Balik	Jumlah Dokumen Umpan Balik Program KKBPK
		Pengelolaan Data Keluarga di TK Desa	Jumlah data keluarga yang tersedia di TK Desa
Pembinaan Kualitas Kependudukan	Jml masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya tentang isu-isu kependudukan		

6.1.2. Program dan Kegiatan Strategis Bidang Keluarga Berencana dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.2. Program dan Kegiatan serta indikator kinerja (Output)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
1	Meningkatnya Efektifitas Keluarga Berencana	Pembinaan dan Penguatan Keluarga Berencana	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan KB MKJP
			Jumlah Peserta KB IUD dan Implant yg dilayani
			Jumlah Peserta KB Pria
			Jumlah Akseptor MOP dan MOW yang dilayani

6.1.3. Program dan Kegiatan Strategis Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.3 Program dan Kegiatan serta indikator kinerja (Output)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
1	Meningkatnya Kelembagaan PUG	Meningkatnya Pengelolaan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Jumlah SDM Perencana SKPD terlatih dalam PPRG
2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam P2WKSS	Jumlah perempuan yang aktif dalam pelaksanaan program P2WKSS
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam GSI	Jumlah perempuan yang terlibat dalam pelaksanaan GSI
			Jumlah kegiatan organisasi perempuan
3	Meningkatnya efektifitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatnya Perlindungan Anak	Jumlah kelompok pencegahan KDRT yang dibentuk
			Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani
4	Meningkatnya jumlah kelembagaan PUHA di desa / kelurahan.		Jumlah desa yang berpartisipasi aktif dalam forum anak daerah
			Jumlah rapat koordinasi anggota gugus tugas KLA

6.1.4. Program dan Kegiatan Strategis Bidang Sekretariat dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 6.4 Program dan Kegiatan serta indikator kinerja (Output)

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)
----	---------	----------	----------------------------

	Dokumen Perencanaan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah laporan kinerja
--	------------------------	--	------------------------

6.2. PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan (Pagu Indikatif) adalah jumlah dana yang tersedia guna pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan (Pagu Indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD termasuk menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanaannya.

Selanjutnya daftar program prioritas dan pagu indikatif masing-masing urusan bidang lingkup SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Barito Kuala selama periode RPJMD 2017-2022 adalah sebagaimana terjabarkan pada tabel berikut:

Tabel 6.5 (C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPPKBP3A

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan pada DPPKBP3A bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indicator outcome dari pelaksanaan program pembangunan tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua bidang urusan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun pemerintahan kepala daerah terpilih periode 2017-2022.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun2017 ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

7.1. Indikator Kinerja Kepala DPPKBP3A (IKU Eselon II)

Indikator Kinerja Eselon II Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta target kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.1 (C.28)

Indikator Kinerja DPPKBP3Ayang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi
		Kondisi					

2	Unmeet Need	13,91	13,06	12,21	11,36	10,51	9,66	9,66
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,11	88,61	88,11	87,61	87,11	86,61	86,61
4	Score Capaian KLA	100	300	350	550	600	650	650

7.2. Indikator Kinerja Eselon III Bidang Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja Eselon III Bidang Pengendalian Penduduk beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.2

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon III Bidang Pengendalian Penduduk yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD 2022
	Indikator Kinerja (Out come)	Kondisi Awal RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Angka Kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)	56,98	55,98	54,98	53,98	52,96	51,98	51,98
2.	Persentase desa yang melaksanakan KIE secara efektif	13,93	20	30	40	50	60	60
3.	Persentase Data Program KBPK yang tersedia	15	20	25	30	35	40	40
4.	Persentase masyarakat	25	30	35	40	45	50	50

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon IV Bidang Pengendalian Penduduk yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD 2022
	Indikator Kinerja (Out Put)	Kondisi Awal RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah peserta yg dibina dan digerakkan dlm keg bhaksos TMKK dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	360	400	600	600	600	600	2800
2	Jumlah Kampung KB yg dibina	17	14	14	14	14	14	70
3.	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yg diberdayakan	0	0	0	201	201	201	201
5	Jumlah dokumen Umpan Balik KKBPK	12	12	12	12	12	12	60
6	Jml data keluarga yang tersedia di TK Desa	0	0	0	35	35	35	35
7	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya ttg isu-isu kependudukan	510	120	850	850	850	850	3520

7.3. Indikator Kinerja Eselon III Bidang Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Eselon III Bidang Keluarga Berencana beserta Target Kinerja

	Indikator Kinerja (Out Put)	Kondisi Awal RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Kondisi Akhir RPJMD 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase KB Aktif	77,92	78,87	80,87	82,87	84,87	86,87	86,87
2.	Persentase KB Pria	1,96	2,00	2,04	2,08	2,12	2,16	2,16
3	Persentase peserta KB MKJP	12,56	13,47	14,47	15,47	16,47	17,47	17,47
4.	Persentase PUS yang meningkat pemahamannya tentang Ketahanan Keluarga	0	0	0	35	45	55	55
5	Persentase anggota BKB yg ber KB	86,18	86,68	87,18	87,68	88,18	88,68	88,68
6	Persentase Anggota Kel BKR yg ber KB	88,02	88,22	88,42	88,62	88,82	89,02	89,02
7	Persentase anggota kel UPPKS yg ber KB	86,30	86,50	86,70	86,90	87,10	87,30	87,30

7.3.1. Indikator Kinerja Eselon IV Bidang Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Eselon IV Bidang Keluarga Berencana beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.5.

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon IV Bidang Keluarga Berencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	Indikator RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				

3	Jumlah peserta KB Pria	885	920	955	990	1025	1060	1060
4	Jumlah akseptor MOP dan MOW yang dilayani	44	42	45	50	55	60	252
5.	Jumlah keluarga yg dilakukan penguatan ketahanan keluarga	0	0	0	250	250	250	750
6	Jumlah anggota kel BKB yang ber KB	4890	4940	4990	5040	5090	5140	5140
7.	Jumlah anggota kel BKR yg ber KB	2093	2134	2193	2243	2293	2343	2343
8.	Jumlah sekolah yg mendapatkan orientasi KRR	0	0	0	6	7	7	20
9	Jumlah anggota kel UPPKS yang ber KB	819	834	849	864	979	894	894

7.4. Indikator Kinerja Eselon III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Eselon III Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anakbeserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.6.

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon IV Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
	Indikator Kinerja (Out Put)	Kondisi Awal RPJMD	2018	2019	2020	2021	

3	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan di P2TP2A	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yg memiliki Forum Anak Desa	19,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	17,5

7.4.1. Indikator Kinerja Eselon IV Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Eselon IV Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Target Kinerja selama periode RPJMD 2017-2022 dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.7.

Indikator Kinerja dan Target Kinerja Eselon IV Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD 2022
	Indikator Kinerja (Out Put)	Kondisi Awal RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah SDM Perencana SKPD terlatih dalam PPRG	6	24	20	20	15	15	94

5	Jumlah Kelompok Pencegahan KDRT yang dibentuk	50	7	7	7	7	7	35
6	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani	20	15	15	15	15	15	75
7	Jumlah desa yang berpartisipasi aktif dalam Forum Anak Desa	7	7	7	7	7	7	35
8	Jumlah Rapat Koordinasi anggota gugus tugas KLA	1	0	2	2	2	2	8

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Strategis ini merupakan pengembangan dari program-program yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, terutama terkait dengan urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) periode Tahun 2017-2022 ini disusun sebagai bahan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan urusan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta bahan rujukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra-Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2022 ini kami berharap dapat digunakan untuk peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program, peningkatan kualitas perencanaan dan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala.

Tabel.2.20 (C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPPKBP3A
Kabupaten Barito Kuala

Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Keluarga Berencana	1.635.235.700	241.319.800	1.887.842.238	444.618.774	770.364.525	1.629.614.250	240.961.800	1.817.524.860	434.607.350	650.858.825	1.635.223.555	241.319.656	1.887.820.540	445.832.204	770.361.558	73,26	49,76
Kesatuan Gerak PKK KB Ke	54.315.100	57.000.400	52.945.500	81.940.100	41.129.500	52.205.100	56.645.400	52.945.500	81.199.600	22.865.000	54.315.071	57.000.367	52.945.500	81.940.033	41.129.490	(49,80)	(71,84)
Pembinaan KB melalui Pemberian Penghargaan	181.597.600	80.429.400	229.501.450	200.734.800	0	181.108.500	80.426.400	225.619.600	200.734.800	0	181.597.271	80.429.335	229.500.932	200.734.397	0		
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	66.560.000	57.790.000	57.924.288	87.688.924	127.318.025	64.150.500	57.790.000	57.924.000	79.112.900	125.999.825	66.559.957	57.789.966	57.924.254	87.688.854	127.317.864	45,19	59,26
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	20.000.000	26.150.000	27.941.000	42.672.950	20.837.000	19.998.000	26.150.000	27.916.000	42.672.950	20.837.000	19.999.996	26.149.992	27.940.992	42.672.931	20.837.000	(51,17)	(51,17)
Pembinaan Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	148.898.000	0	0	0	581.080.000	148.898.000	0	0	0	481.157.000	148.897.778	0	0	0	581.077.204		
Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling	1.070.980.000	0	1.486.734.000	0	0	1.070.980.000	0	1.420.971.560	0	0	1.070.968.530	0	1.486.712.873	0	0		
Pembinaan Keluarga Berencana	31.800.000	19.950.000	32.796.000	31.582.000	0	31.800.000	19.950.000	32.148.200	30.887.100	0	31.799.989	19.949.996	32.795.989	32.795.989	0		
Promosi Pelayanan Khiba	61.085.000	0	0	0	0	60.474.150	0	0	0	0	61.084.963	0	0	0	0		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	53.539.900	20.570.000	81.666.000	62.308.350	31.467.500	53.318.900	20.569.900	77.522.300	61.138.050	31.467.500	53.539.885	20.569.995	81.665.975	62.308.330	31.467.500	(49,50)	(48,53)
Pelaksanaan KIE KRR melalui kelompok KB	23.539.900	20.570.000	21.700.000	36.568.500	31.467.500	23.318.900	20.569.900	21.699.900	35.398.200	31.467.500	23.539.894	20.569.995	21.699.995	36.568.487	31.467.500	(13,95)	(11,10)
Advokasi dan KIE tentang KRR	30.000.000	0	41.372.000	0	0	30.000.000	0	37.984.000	0	0	29.999.991	0	41.371.984	0	0		
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	0	0	18.594.000	25.739.850	0	0	0	17.838.400	25.739.850	0	0	0	18.593.996	25.739.843	0		
Program Pelayanan Kontrasepsi	30.000.000	35.750.000	87.085.000	108.025.000	66.566.000	30.000.000	35.750.000	87.085.000	108.025.000	66.566.000	29.999.991	35.749.987	87.084.924	108.024.883	66.565.956	(38,38)	(38,38)
Pelayanan Medis Operasi serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	345.583.200	393.478.300	503.234.800	148.208.300	269.026.885	345.583.000	393.476.300	499.949.650	148.002.300	255.642.085	345.393.689	393.424.652	503.233.401	148.208.230	269.026.670	81,52	72,73
Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	0	9.995.000	21.494.000	10.900.000	85.319.500	0	9.995.000	19.634.000	10.900.000	73.372.500	0	9.989.902	21.493.995	10.899.998	85.319.427	682,75	573,14
Pengelolaan data dan informasi Program KB	47.082.500	71.770.000	57.800.000	0	105.739.600	47.082.500	71.770.000	57.751.000	0	104.601.800	47.082.477	71.769.948	57.799.966	0	105.739.489		
Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli KB	241.668.200	248.370.800	367.380.000	70.250.000	0	241.668.000	248.370.800	366.003.850	70.250.000	0	241.667.615	248.370.183	367.378.655	70.249.950	0		
Koordinasi Pengelolaan Program	17.350.000	18.010.000	32.975.000	30.805.000	34.316.000	17.350.000	18.010.000	32.975.000	30.805.000	34.316.000	17.349.996	18.009.996	32.974.989	30.804.990	34.315.988	11,40	11,39
Review Program KB	9.807.500	9.952.000	10.947.200	18.098.800	0	9.807.500	9.952.000	10.947.200	18.098.800	0	9.618.607	9.904.130	10.947.198	18.098.796	0		
Kabupaten	18.450.000	18.488.500	0	0	0	18.450.000	18.488.500	0	0	0	18.449.996	18.488.496	0	0	0		
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	11.225.000	16.892.000	12.638.600	18.154.500	43.651.785	11.225.000	16.890.000	12.638.600	17.948.500	43.351.785	11.224.998	16.891.997	12.638.598	18.154.496	43.651.766	140,45	141,53
Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	16.592.000	20.440.000	41.235.000	10.238.500	27.819.000	16.592.000	20.440.000	41.235.000	10.238.500	27.819.000	16.591.997	20.439.995	41.234.982	10.238.498	27.818.992	171,71	171,71
Pengumpulan bahan informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang	16.592.000	20.440.000	41.235.000	10.238.500	27.819.000	16.592.000	20.440.000	41.235.000	10.238.500	27.819.000	16.591.997	20.439.995	41.234.982	10.238.498	27.818.992	171,71	171,71
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	78.120.000	150.500.000	412.897.500	77.876.000	101.765.000	71.062.950	142.340.000	388.478.500	77.876.000	97.005.000	78.119.984	145.865.850	409.607.142	70.759.597	99.895.831	30,67	24,56
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan	0	7.000.000	13.720.000	6.276.000	10.500.000	0	3.380.000	13.720.000	6.276.000	8.220.000	0	2.365.930	13.719.998	3.938.754	8.630.895	67,30	30,97
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	18.000.000	39.000.000	42.720.000	59.500.000	78.756.600	18.000.000	37.000.000	42.120.000	59.500.000	77.886.600	17.999.996	38.999.985	42.719.982	59.499.964	78.756.538	32,36	30,90
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	0	43.150.000	6.000.000	12.508.400	0	0	29.184.000	6.000.000	10.898.400	0	0	43.149.987	3.599.940	12.508.398	108,47	81,64
Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	23.947.500	13.000.000	16.886.000	6.100.000	0	23.708.000	12.700.000	16.586.000	6.100.000	0	23.947.494	12.999.998	16.885.997	3.720.939	0		
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yg berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	16.525.000	13.000.000	6.160.000	0	0	10.493.350	11.660.000	4.660.000	0	0	16.524.998	12.999.998	2.870.498	0	0		

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	19.647.500	78.500.000	290.261.500	0	0	18.861.600	77.600.000	282.208.500	0	0	19.647.496	78.499.939	290.260.680	0	0		
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	46.550.000	55.000.000	127.964.000	132.563.900	180.000.000	46.215.000	52.235.400	127.554.000	132.558.900	171.175.000	46.549.986	54.999.982	127.963.892	132.563.790	179.999.775	35,78	29,13
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	33.500.000	38.000.000	27.964.000	32.563.900	30.000.000	33.165.000	37.221.000	27.964.000	32.558.900	27.200.000	33.499.988	37.999.985	27.963.992	32.563.890	29.999.991	(7,87)	(16,46)
Pembinaan organisasi perempuan (GOW)	13.050.000	0	100.000.000	100.000.000	150.000.000	13.050.000	0	99.590.000	100.000.000	143.975.000	13.049.998	0	99.999.900	99.999.900	149.999.784	50	43,97
Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam mengelola usaha	0	17.000.000	0	0	0	0	15.014.400	0	0	0	0	16.999.997	0	0	0		
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	0	14.500.000	8.479.000	26.369.500	32.925.000	0	14.475.350	8.479.000	22.838.600	32.925.000	0	14.499.997	7.189.259	24.184.490	28.350.269	24,86	44,16
Pelaksanaan sos yg terkait dg kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0	14.500.000	8.479.000	19.594.500	20.015.000	0	14.475.350	8.479.000	16.063.600	20.015.000	0	14.499.997	7.189.259	19.594.496	20.014.995	2,15	24,60
Pelaksanaan sos yg terkait dg kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Sos Dampak Negatif Pernikahan di Usia Dini)	0	0	0	6.775.000	6.555.000	0	0	0	6.775.000	6.555.000	0	0	0	4.589.994	4.296.736	(3,25)	(3,25)
Pelaksanaan sos yg terkait dg kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Sos RT / RW Ramah Anak))	0	0	0	0	6.355.000	0	0	0	0	6.355.000	0	0	0	0	4.038.538		
Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	0	71.000.000	84.223.500	253.900.000	370.410.000	0	69.910.000	84.223.500	243.758.000	359.808.000	0	70.999.950	84.223.429	253.899.381	370.409.123	46,24	47,61
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	0	0	84.223.500	253.900.000	80.000.000	0	0	84.223.500	243.758.000	80.000.000	0	0	84.223.429	253.899.381	79.999.936	(68,49)	(67,18)
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	0	71.000.000	0	0	290.410.000	0	69.910.000	0	0	279.808.000	0	70.999.950	0	0	290.409.187		
	2.205.620.800	1.002.558.100	3.234.627.038	1.264.108.324	1.850.343.910	2.192.386.100	990.158.750	3.132.051.810	1.239.042.700	1.693.266.410	2.205.419.087	997.870.064	3.230.023.544	1.256.019.403	1.843.895.674	46,37	36,66

Tabel.2.19 (C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBP3A
Kabupaten Barito Kuala

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPPKBP3A Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif				74%	77%	78%	79%	87%	74%	77%	78%	79%	87%	74%	77%	78%	79%	87%
2	Persentase peserta MKJP				73%	75%	61%	87%	54%	73%	75%	61%	87%	54%	73%	75%	61%	87%	54%
3	Persentase kelompok kegiatan yang aktif																		
	BKB (Bina Keluarga Balita)				88,11%	89,67%	90%	90,33%	92,54%	88,11%	89,67%	90%	90,33%	92,54%	88,11%	89,67%	90%	90,33%	92,54%
	BKR (Bina Keluarga Remaja)				92,37%	92,53%	92,64%	92,64%	93,47%	92,37%	92,53%	92,64%	92,64%	93,47%	92,37%	92,53%	92,64%	92,64%	93,47%
	BKL (Bina Keluarga Lansia)				89,44%	87,61%	87,61%	89,40%	91,34%	89,44%	87,61%	87,61%	89,40%	91,34%	89,44%	87,61%	87,61%	89,40%	91,34%
4	Persentase jumlah kelompok UPPKS yang aktif				84,60%	85,45%	86,18%	87,63%	87,77%	84,60%	85,45%	86,18%	87,63%	87,77%	84,60%	85,45%	86,18%	87,63%	87,77%
5	Jumlah desa/kelurahan Layak Anak				0%	0%	2	1	2	0%	0%	2	1	2	0%	0%	2	1	2
6	Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG				-	7,14%	28,57%	42,86%	21,43%	-	7,14%	28,57%	42,86%	21,43%	-	7,14%	28,57%	42,86%	21,43%
7	Persentase penanganan laporan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dana anak pada P2T2A				-	7,14%	28,57%	42,86%	21,43%	-	7,14%	28,57%	42,86%	21,43%	-	7,14%	28,57%	42,86%	21,43%

Marabahan, Mei 2017
Kepala DPPKBP3A

Drs. H. Syarkawi HAM, M.Pd
NIP. 19590812 197801 1 001

Tabel 6.5 (c.26)

Strategi dan Arah Kebijakan DPPKBP3A

VISI RPJMD	Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)		
Misi ke III RPJMD	Meningkatnya Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		
IKU RPJMD	Meningkatnya Usia Harapan Hidup		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Mewujudkan keberlangsungan ber KB serta meningkatkan kualitas KIE dan pelayanan KB/KR serta mengendalikan angka kelahiran	Sasaran 1.1 Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Strategi 1.1 Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KKB melalui penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi	Kebijakan 1.1 Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dan peningkatan KIE serta ketersediaan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai dan akurat
		Strategi 1,2 Memperluas jangkauan serta mewuiudkan	Kebijakan 1.2 Menguatkan advokasi KKBPK dan meningkatkan

Perempuan dan Anak	Perempuan dan Anak	terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.	Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan
		Strategi 2.2 Memperkuat lembaga serta meningkatkan koordinasi kegiatan pemenuhan Hak Anak	Kebijakan 2.2 Pemenuhan Hak Anak dengan focus pada percepatan pencapaian KLA
Tujuan 3 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Sasaran 3.1 Meningkatnya Kesetaraan Gender	Strategi 3.1 Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kebijakan 3.1 Pengarutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
		Strategi 3.1 Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Kebijakan 3.1 Pengarutamaan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel 6.4 (C.27)

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BARITO KUALA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						(14)	(15)
							Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
							Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu	Target / Pagu		
Mewujudkan keberlangsungan ber KB serta meningkatkan kualitas KIE dan pelayanan KB/KR serta mengendalikan angka kelahiran	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk				1,42 % Rp 260.129.000	1,41 % Rp 283.639.645	1,40 % Rp 490.000.000	1,39 % Rp 475.000.000	1,38 % Rp 560.000.000	1,37 % Rp 595.000.000	1,37 % Rp 2.403.639.645	Kepala	Kab. Batola
			2.08.15	Program Keluarga Berencana	Angka kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 th)	56,98% Rp 59.000.000	55,98% Rp 38.387.650	54,98% Rp 140.000.000	53,98% Rp 145.000.000	52,98% Rp 155.000.000	51,98% Rp 165.000.000	51,98% Rp 643.387.650	Bidang Dalduk	Kab. Batola
			2.08.15.08	Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK KB KES	Jml peserta yg dibina dan digerakan dim keg bhakos TMKK dan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	444 orang Rp 59.000.000	400 orang Rp 38.387.650	600 orang Rp 65.000.000	600 orang Rp 65.000.000	600 orang Rp 70.000.000	600 orang Rp 75.000.000	2800 orang Rp 313.387.650	Seksi Peny & Pengg	Kab. Batola
			2.08.15.09	Pembinaan KB melalui pemberian penghargaan	Jml lomba Kependudukan dan KB	0 Rp -	0 Rp -	8 Rp 75.000.000	8 Rp 80.000.000	8 Rp 85.000.000	8 Rp 90.000.000	32 Rp 330.000.000	Seksi Peny & Pengg	Kab. Batola
			2.08.18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg mandiri	Persentase desa yang melaksanakan KIE secara efektif	13,97% Rp 71.129.000	20% Rp 167.840.995	30% Rp 225.000.000	40% Rp 180.000.000	50% Rp 235.000.000	60% Rp 240.000.000	60% Rp 1.047.840.995	Bidang Dalduk	Kab. Batola
			2.08.18.01	Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB (Pembinaan Kampung KB)	Jumlah Kampung KB yang dibina.	17 desa Rp 71.129.000	14 desa Rp 167.840.995	14 desa Rp 200.000.000	14 desa Rp 150.000.000	14 desa Rp 200.000.000	14 desa Rp 200.000.000	70 desa Rp 917.840.995	Seksi Peny & Pengg	Kab. Batola
			2.08.18.09	Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB (Penguatan IMP)	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan	0 Rp -	0 Rp -	201 Orang Rp 25.000.000	201 Orang Rp 30.000.000	201 Orang Rp 35.000.000	201 Orang Rp 40.000.000	201 Orang Rp 130.000.000	Seksi Peny & Pengg	Kab. Batola
			2.08.18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg mandiri	Persentase desa yg berhasil dim pembuatan data dan informasi KKBPK	50% Rp 130.000.000	60% Rp 45.201.000	65% Rp 50.000.000	70% Rp 60.000.000	75% Rp 70.000.000	80% Rp 80.000.000	80% Rp 305.201.000	Bidang Dalduk	Kab. Batola
			2.08.18.02	Pengelolaan data dan informasi program-program KB	Jumlah dokumen Umpan Balik KKBPK	0 Rp 130.000.000	12 dokumen Rp 45.201.000	12 dokumen Rp 25.000.000	12 dokumen Rp 30.000.000	12 dokumen Rp 35.000.000	12 dokumen Rp 40.000.000	60 dokumen Rp 175.201.000	Seksi Dalduk	Kab. Batola
					Jumlah data keluarga yg tersedia di TK Desa	0 Rp -	0 Rp -	35 Rp 25.000.000	35 Rp 30.000.000	35 Rp 35.000.000	35 Rp 40.000.000	35 Rp 130.000.000	Seksi Dalduk	Kab. Batola
			2.08.18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yg mandiri	Persentase masyarakat yg mengetahui tentang isu-isu kependudukan	0 Rp -	45% Rp 32.210.000	50% Rp 75.000.000	55% Rp 90.000.000	60% Rp 100.000.000	65% Rp 110.000.000	65% Rp 407.210.000	Bidang Dalduk	Kab. Batola
			2.08.18.10	Implementasi Program Pengendalian Penduduk	Jumlah masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya tentang isu-isu kependudukan	0 Rp -	120 orang Rp 32.210.000	850 orang Rp 75.000.000	850 orang Rp 90.000.000	850 orang Rp 100.000.000	850 orang Rp 110.000.000	3520 orang Rp 407.210.000	Seksi Dalduk	Kab. Batola
Mewujudkan keberlangsungan ber KB serta meningkatkan kualitas KIE dan pelayanan KB/KR serta mengendalikan	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Unmeet Need				13,91 % Rp 366.165.810	13,06 % Rp 311.906.500	12,21 % Rp 424.446.000	11,36 % Rp 418.500.000	10,51 % Rp 453.750.000	9,66 % Rp 504.500.000	9,66 % Rp 2.113.102.500	Kepala	Kab. Batola
			2.08.15.	Program Keluarga Berencana	Presentase KB Aktif	77,92% Rp 148.155.025	78,87% Rp 79.246.000	80,87% Rp 118.500.000	82,87% Rp 122.500.000	84,87% Rp 131.000.000	86,87% Rp 141.000.000	86,87% Rp 592.246.000	Bidang KB	Kab. Batola
			2.08.15.01	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin melalui Pelayanan KB Keliling	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan KB MKJP	17 Rp 127.318.025	17 Desa Rp 79.246.000	17 Desa Rp 80.000.000	17 Desa Rp 80.000.000	17 Desa Rp 85.000.000	17 Desa Rp 90.000.000	85 Desa Rp 414.246.000	Seksi Penj ber KB	Kab. Batola

2.8.15.3	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah Peserta KB IUD dan Implant yang dilayani	217 orang	0	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	2000 orang		Kab. Batola
			Rp 20.837.000	Rp -	Rp 38.500.000	Rp 42.500.000	Rp 46.000.000	Rp 51.000.000	Rp 178.000.000		
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS yang meningkat pemahamannya tentang ketahanan keluarga	0	0	25%	35%	45%	55%	55%	Bidang KB	Kab. Batola
			Rp -	Rp -	Rp 24.292.000	Rp 27.500.000	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000	Rp 116.792.000		
2.8.15.2	Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Keluarga yang dilakukan penguatan ketahanan keluarga	0	0	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1000 Orang	Seksi PK	Kab. Batola
			Rp -	Rp -	Rp 24.292.000	Rp 27.500.000	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000	Rp 116.792.000		
2.08.15	Program Keluarga Berencana	Persentase KB Pria	1,98 %	2,00%	2,04 %	2,08 %	2,12 %	2,16 %	2,16 %	Bidang KB	Kab. Batola
			Rp 14.190.500	Rp 24.000.000	Rp 30.000.000	Rp 32.500.000	Rp 37.500.000	Rp 40.000.000	Rp 164.000.000		
2.08.15.07	Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan KR	Jumlah Peserta KB Pria	885 Orang	920 orang	955 orang	990 orang	1025 orang	1060 orang	1060 orang	Seksi Penj ber KB	Kab. Batola
			Rp 14.190.500	Rp 24.000.000	Rp 30.000.000	Rp 32.500.000	Rp 37.500.000	Rp 40.000.000	Rp 164.000.000		
2.8.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Presentase anggota kelompok BKR yang ber KB	88,02%	88,22%	88,42%	88,62%	88,82%	89,02%	89,02	Bidang KB	Kab. Batola
			Rp 31.467.500	Rp 24.036.500	Rp 51.823.000	Rp 57.500.000	Rp 60.250.000	Rp 73.500.000	Rp 267.109.500		
2.08.16.2	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat melalui Orientasi Program KRR bagi PIK Remaja	Jumlah sekolah yang mendapatkan orientasi KRR	0	0	5 sekolah	6 sekolah	7 sekolah	7 sekolah	25 sekolah	Seksi PK	Kab. Batola
			Rp -	Rp -	Rp 25.035.000	Rp 27.500.000	Rp 30.250.000	Rp 33.500.000	Rp 116.285.000		
2.08.16.03	Pelaksanaan KIE KRR melalui kelompok KB	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber KB	2093 orang	2134 orang	2193 orang	2243 orang	2293 orang	2343 orang	2343 orang	Seksi PK	Kab. Batola
			Rp 31.467.500	Rp 24.036.500	Rp 26.788.000	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000	Rp 40.000.000	Rp 155.824.500		
2.08.17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Peserta KB MKJP	12,56%	13,47%	14,47%	15,47%	16,47%	17,47%	17,47%	Bidang KB	Kab. Batola
			Rp 66.566.000	Rp 65.805.000	Rp 85.500.000	Rp 90.000.000	Rp 100.000.000	Rp 110.000.000	Rp 451.305.000		
2.08.17.04	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah aceptor MOP dan MOW yang dilayani	44 orang	42 orang	45 orang	50 orang	55 orang	60 orang	252 orang	Seksi Penj ber KB	Kab. Batola
			Rp 66.566.000	Rp 65.805.000	Rp 85.500.000	Rp 90.000.000	Rp 100.000.000	Rp 110.000.000	Rp 451.305.000		
2.08.18	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Presentase Anggota Kelompok UPPKS yang ber KB	86,30 %	86,50 %	86,70 %	86,90 %	87,10 %	87,30 %	87,30 %	Bidang KB	Kab. Batola
			Rp 77.967.785	Rp 78.429.000	Rp 74.418.000	Rp 46.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 303.847.000		
2.08.18.03	Pengelolaan Program KKBPK	Jumlah Pertemuan Pengelolaan Program KKBPK	4 kali	4 kali	0	0	0	0	4 kali	Seksi PK	Kab. Batola
			Rp 34.316.000	Rp 33.929.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33.929.000		
2.08.18.07	Pemberdayaan ekonomi Keluarga	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB	819 orang	834 orang	849 orang	864 orang	879 orang	894 orang	894 orang	Seksi PK	Kab. Batola
			Rp 43.651.785	Rp 44.500.000	Rp 74.418.000	Rp 46.000.000	Rp 50.000.000	Rp 55.000.000	Rp 269.918.000		
2.08.22	Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Presentase Anggota Kelompok BKB yang ber KB	86,18 %	86,68 %	87,18 %	87,68 %	88,18 %	88,68 %	88,68 %	Bidang KB	Kab. Batola
			Rp 27.819.000	Rp 40.390.000	Rp 39.913.000	Rp 42.500.000	Rp 45.000.000	Rp 50.000.000	Rp 217.803.000		
2.08.22.01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB	4890 orang	4940 orang	4990 orang	5040 orang	5090 orang	5140 orang	5140 orang	Seksi PK	Kab. Batola
			Rp 27.819.000	Rp 40.390.000	Rp 39.913.000	Rp 42.500.000	Rp 45.000.000	Rp 50.000.000	Rp 217.803.000		
Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Score Capaian KLA	100	300	350	400	500	550	550	Kepala	Kab. Batola
				Rp 445.901.000	Rp 490.000.000	Rp 535.000.000	Rp 590.000.000	Rp 670.000.000	Rp 2.730.901.000		
2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Desa yang memiliki forum anak desa	19,4 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	17,5 %	Bidang PPA	Kab. Batola
				Rp 175.801.000	Rp 200.000.000	Rp 225.000.000	Rp 250.000.000	Rp 300.000.000	Rp 1.150.801.000		
2.02.2.02.01.16.05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah desa yang berpartisipasi aktif dalam forum anak daerah	39 desa	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	35 desa	Seksi PA	Kab. Batola
				Rp 121.940.000	Rp 150.000.000	Rp 165.000.000	Rp 180.000.000	Rp 215.000.000	Rp 831.940.000		

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kesetaraan gender	2.02.2.02.01.16.09	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah rapat koordinasi anggota gugus tugas KLA Jumlah Dokumen RAD KLA	0 0	2 kali Rp 50.000.000	2 kali Rp 60.000.000	2 kali Rp 70.000.000	2 kali Rp 85.000.000	8 kali Rp 265.000.000	Seksi PA	Kab. Batola	
		2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan di P2T2A	0	1 Dok. Rp 53.861.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 dok. Rp 53.861.000	Bidang PPA	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.17.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah kelompok pencegahan KDRT yang dibentuk	50 klp.	7 klp. Rp 54.600.000	7 klp. Rp 75.000.000	7 klp. Rp 85.000.000	7 klp. Rp 95.000.000	7 klp. Rp 110.000.000	35 klp. Rp 419.600.000	Seksi PA	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan thd tindak kekerasan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilayani	20 kasus	15 kasus Rp 215.500.000	15 kasus Rp 215.000.000	15 kasus Rp 225.000.000	15 kasus Rp 245.000.000	15 kasus Rp 260.000.000	75 kasus Rp 1.160.500.000	Seksi PA	Kab. Batola
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			89,61 % Rp 270.500.000	90,11 % Rp 298.000.000	90,61 % Rp 321.000.000	91,11 % Rp 354.000.000	91,61 % Rp 387.500.000	91,61 % Rp 1.631.000.000	Kepala	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.15	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Terwujudnya pelaksanaan sosialisasi KKG	50 orang	50 orang Rp 15.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50 orang Rp 15.000.000	Bidang PPA	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.15.03	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi KKG	50 orang	50 orang Rp 15.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	50 orang Rp 15.000.000	Seksi PPP	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kelembagaan yang aktif dalam pembangunan gender	33,33 %	30% Rp 10.500.000	20% Rp 28.000.000	20% Rp 31.000.000	15% Rp 34.000.000	15% Rp 37.500.000	100% Rp 141.000.000	Bidang PPA	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.16.01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	Jumlah SDM Perencana SKPD terlatih dalam PPRG	24 orang	24 orang Rp 10.500.000	20 orang Rp 28.000.000	20 orang Rp 31.000.000	15 orang Rp 34.000.000	15 orang Rp 37.500.000	94 orang Rp 141.000.000	Seksi PPP	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terwujudnya Penurunan AKI dan AKB	17 kec dan desa	17 Kec dan desa Rp 130.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	17 Kec dan desa Rp 130.000.000	Bidang PPA	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.17.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah perempuan yg terlibat dalam pelaksanaan Program GSI	150 Orang	150 Orang Rp 130.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	150 Orang Rp 130.000.000	Seksi PPP	Kab. Batola
		2.02.2.02.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase perempuan yg berperan dalam pembangunan di tingkat desa	8,87	8,87 Rp 115.000.000	8,87 Rp 270.000.000	8,87 Rp 290.000.000	8,87 Rp 320.000.000	8,87 Rp 350.000.000	8,87 Rp 1.345.000.000	Bidang PPA	Kab. Batola
2.02.2.02.01.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi	2 keg.	2 keg. Rp 55.000.000	2 keg. Rp 65.000.000	2 keg. Rp 70.000.000	2 keg. Rp 80.000.000	2 keg. Rp 90.000.000	10 keg. Rp 360.000.000	Seksi PPP	Kab. Batola		
2.02.2.02.01.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah perempuan yg aktif dalam pelaksanaan Program P2WKSS	70 orang	70 orang Rp 60.000.000	70 orang Rp 60.000.000	70 orang Rp 70.000.000	70 orang Rp 80.000.000	70 orang Rp 90.000.000	350 orang Rp 360.000.000	Seksi PPP	Kab. Batola		
		Jumlah perempuan yg terlibat dalam pelaksanaan Program GSI	0	150 orang Rp 145.000.000	150 orang Rp 150.000.000	150 orang Rp 160.000.000	150 orang Rp 170.000.000	150 orang Rp 170.000.000	750 orang Rp 625.000.000	Seksi PPP	Kab. Batola		
JUMLAH PAGU PROGRAM / KEGIATAN (RENSTRA 2017-2022)					Rp 1.311.947.145	Rp 1.702.446.000	Rp 1.749.500.000	Rp 1.957.750.000	Rp 2.157.000.000	Rp 8.878.643.145			

PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG RENSTRA 2017 - 2022			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala	Kab. Batola	
			Rp 1.412.515.455	Rp 550.057.055	Rp 1.081.100.000	Rp 1.014.600.000	Rp 925.600.000	Rp 900.600.000	Rp 4.315.620.055			
		2.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola	
			Rp 1.293.550.085	Rp 338.491.685	Rp 447.600.000	Rp 533.100.000	Rp 533.100.000	Rp 533.100.000	Rp 2.374.454.685			
		2.02.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat, Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Buah/Surat)	200	200	700	500	500	500	2400	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	13200000		
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah tenaga administrasi kantor dan sopir	3	3	4	4	4	4	19	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 23.760.000	Rp 29.040.000	Rp 39.600.000	Rp 39.600.000	Rp 39.600.000	Rp 39.600.000	Rp 39.600.000	Rp 187.440.000		
		2.02.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Langganan Telepon, Air Bersih, Faximile dan Listrik (Bulan)	48	48	48	48	48	48	240	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 29.775.000	Rp 29.775.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	189775000		
		2.02.01.05 Penyediaan jasa jaminan keamanan kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor (bulan)	12	12	12	12	12	12	60	Kasubbag. Umpag	
			Rp 15.000.000	Rp 13.285.000	Rp 15.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 82.285.000		
		2.02.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pajak STNK Kendaraan Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat)	3	3	28	46	46	46	40	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 9.850.000	Rp 9.850.000	Rp 15.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 78.850.000		
		2.02.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor dan Alat kebersihan	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor (Jenis)	18	18	18	18	18	18	90	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 12.349.000	Rp 4.989.000	Rp 11.540.000	Rp 11.540.000	Rp 11.540.000	Rp 11.540.000	Rp 11.540.000	Rp 51.149.000		
			Jumlah tenaga kebersihan kantor	2	2	2	2	2	2	10	Kasubbag. Umpag	
			Rp 7.360.000	Rp 7.360.000	Rp 8.460.000	Rp 8.460.000	Rp 8.460.000	Rp 8.460.000	Rp 8.460.000	Rp 24.280.000		
		2.02.01.10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat kantor yg disediakan	28	28	28	28	28	28	140	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 20.949.085	Rp 21.349.085	Rp 40.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 196.349.085		
		2.02.01.11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah jenis cetakan berkas kantor	5	5	5	5	5	5	25	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 5.600.000	Rp 5.600.000	Rp 6.500.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 72.100.000		
			Jumlah penggandaan yang disediakan	29915	34098	24000	24000	24000	24000	130098	Kasubbag. Umpag	
			Rp 5.983.000	Rp 6.819.600	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 7.200.000	Rp 41.602.600		
			Jumlah Penjilidan yang disediakan	130	130	130	130	130	130	650	Kasubbag. Umpag	
			Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 1.300.000	Rp 6.500.000		
		2.02.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	4	4	4	4	4	4	20	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 12.000.000		
		2.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar harian / media cetak (bulan)	24	24	24	24	24	24	120	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 2.196.000	Rp 2.196.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 14.196.000		
		2.02.01.17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Minum dan Snack Harian, Makan Minum Rapat Staf dan SKPD (Porsi)	8300	8140	8200	8250	8300	8300	41190	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 35.785.000	Rp 35.785.000	Rp 40.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 45.000.000	Rp 210.785.000		
		2.02.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah (Laporan)	39	39	45	45	45	45	219	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 1.116.443.000	Rp 166.443.000	Rp 200.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	Rp 1.116.443.000		
		2.02.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Terkait Tupoksi DPPKBP3A (Laporan)	17	17	17	17	17	17	85	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 77.500.000		
		2.02.02.. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola	
			Rp 64.416.000	Rp 157.016.000	Rp 541.000.000	Rp 389.000.000	Rp 300.000.000	Rp 275.000.000	Rp 1.516.616.000			
		2.02.02.03 Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah bangunan gedung kantor yang	0	1	1	0	0	0	1	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola

	kantor	terpelihara dg baik(pembuatan dan pengecatan pagar kantor)	Rp -	Rp 95.400.000	Rp 150.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000		
2.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional (buah)	0	0	5	4	4	4	17	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp -	Rp -	Rp 100.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 340.000.000		
2.02.02.06	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pembelian mebeleur kantor	0	0	60	20	0	0	60	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp -	Rp -	Rp 80.000.000	Rp 50.000.000	Rp -	Rp -	Rp 80.000.000		
2.02.02.06	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Jumlah pembelian laptop dan printer	0	0	6	6	3	0	15	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			0	Rp -	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 25.000.000	Rp -	Rp 125.000.000		
2.02.02.06	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembelian AC	Rp -	0	3	2	0	0	5	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp -	Rp -	Rp 21.000.000	Rp 14.000.000	Rp -	Rp -	Rp 35.000.000		
2.02.02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas Roda 2 / 4 yg siap operasional (buah)	3	3	28	52	52	52		Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 54.416.000	Rp 54.416.000	Rp 125.000.000	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000	Rp 704.416.000		
2.02.02.28	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah laptop, printer, AC yg terpelihara dan siap operasional	3	16	33	33	33	33	15	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 10.000.000	Rp 7.200.000	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 82.200.000		
2.02.15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan SDM Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola
			Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 340.000.000		
2.02.15.01	Pendidikan pelatihan formal	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkatkan Kompetensinya	4 orang	4 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	28 orang	Kasubbag. Umpag	Kab. Batola
			Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp 340.000.000		
2.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian pelaporan yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola
			Rp 688.000	Rp 688.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 10.688.000		
2.02.06.02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu	0	0	1	1	1	1	4	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
					Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 3.000.000		
2.02.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Semesteran yg benar dan tepat waktu	2	2	2	2	2	2	10	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 750.000	Rp 3.300.000		
2.02.06.10	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dan Aset yang benar dan tepat waktu	1	1	2	2	2	2	9	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 388.000	Rp 388.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 4.388.000		
2.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase penyediaan data / informasi hasil-hasil pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretaris	Kab. Batola
			Rp 13.861.370	Rp 13.861.370	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 73.861.370		
4.03.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah Pameran yg mempromosikan hasil pembangunan daerah (DPPKBP3A)	1	1	1	1	1	1	1	Kasubbag. Perenc KA	Kab. Batola
			Rp 13.861.370	Rp 13.861.370	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 73.861.370		
JUMLAH PAGU PROGRAM / KEGIATAN (PENDUKUNG RENSTRA 2017-2022)				Rp 550.057.055	Rp 1.081.100.000	Rp 1.014.600.000	Rp 925.600.000	Rp 900.600.000	Rp 4.471.957.055		
JUMLAH PAGU PROGRAM / KEGIATAN (DPPKBP3A 2017-2022)				Rp 1.311.947.145	Rp 1.702.446.000	Rp 1.749.500.000	Rp 1.957.750.000	Rp 2.157.000.000	Rp 8.878.643.145		

Marabahan, Mei 2017
KEPALA DINAS

Drs. H. SYARKAWI HAM, M.Pd
NIP. 19590812 197801 1 001